

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan

WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh).
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Daerah Kota 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJPD terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing Daerah Kota, dan aspek pelayanan umum. Selanjutnya diuraikan capaian pembangunan daerah periode tahun 2005-2022, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga tahun 2045, serta arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan yang disimpulkan dari Bab II dan isu strategis Daerah Kota yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi Daerah Kota.
- d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
Memuat visi yang merupakan kondisi Daerah Kota yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Daerah Kota.
- e. BAB V ...

- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
Memuat arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi Daerah Kota, serta sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi Daerah Kota yang dilengkapi dengan indikator utama pembangunan.
- f. BAB VI : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan, pembiayaan dan manajemen risiko pembangunan.

BAB IV ISI DAN URAIAN RPJPD

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kota.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, krisis kesehatan/pandemi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 4 November 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 4 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMMAD HASAN ASARI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT:
(4/128/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



KYUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijalankan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. supaya arah pembangunan di daerah terarah dan tersinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, maka diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan yang dapat memastikan hal tersebut, yang salah satunya berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Barat yang disusun dengan

mempertimbangkan ...

mempertimbangkan input-input yang berasal dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik di tingkat nasional, tingkat regional maupun di tingkat lokal. Selanjutnya, RPJPD ini akan menjadi acuan dalam pembentukan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta dokumen perencanaan lainnya.

Peraturan daerah ini memuat materi mengenai Program Pembangunan Daerah, Tata Urut RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, serta Ketentuan Peralihan. Adapun dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang m bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 75

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara historis, Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Burgerlijk Bestuur (1914) dengan status Gemeenteraad Van Sukabumi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam konteks perekonomian regional kala itu, Kota Sukabumi sudah dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan, dan jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta.

Peran strategis Kota Sukabumi tersebut masih tetap bertahan hingga sekarang. Saat ini, Kota Sukabumi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Ke depannya, Kota Sukabumi sangat berpeluang untuk berkembang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya atau *hinterland*.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan menjaga sinergitas dan keselarasan antar dokumen baik di tingkat kota ataupun dengan tingkat provinsi dan nasional.

RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 akan segera berakhir masa berlakunya. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD.

Bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka Kota Sukabumi diharuskan untuk menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042. Hal ini juga sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 yang memuat visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan, dalam proses penyusunannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Secara teknokratik, penyusunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 diawali dengan evaluasi hasil RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan *background study* berdasarkan tema pembangunan yang dilakukan oleh akademisi serta kajian rencana pembangunan lainnya dan rencana sektoral jangka panjang. Secara partisipatif, dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui penyebaran kuisioner secara *online*, serial diskusi dengan pamangku kepentingan, konsultasi publik, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Secara politis, dilakukan pembahasan dengan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi pada tahap pembahasan rancangan awal dan rancangan akhir.

Melalui proses penyusunan yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 diharapkan menjadi arahan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional terutama dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Selain itu RPJPD Kota Sukabumi juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia/masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. RPJPD tersebut akan dijabarkan RPJMD sehingga semua Wali Kota Sukabumi harus mempedomani RPJPD sesuai dengan arah pembangunan dan sasaran pokok lima tahunan pada periode bersangkutan.

Disusunnya RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045, maka seluruh pemangku kepentingan Kota Sukabumi diharapkan mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah serta menjamin kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan perwujudan Visi Kota Sukabumi 2045 tentunya akan berkontribusi pada perwujudan Visi Provinsi Jawa Barat 2045 dan Visi Indonesia Emas 2045.

1.2 DASAR HUKUM

RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
 5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); dan
 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1).

Untuk substansi RPJPN Tahun 2025-2045 yang dipedomani yaitu terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja/indikator pembangunan. Sedangkan substansi RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 yang dipedomani yaitu arahan pengembangan wilayah.

Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis. Sedangkan substansi hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan, kesimpulan, dan rekomendasi.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga diuraikan tentang capaian pembangunan periode 2005-2022, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana per lima tahun hingga tahun 2045, serta arah pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan terkait visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

Bab VI Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Kota Sukabumi

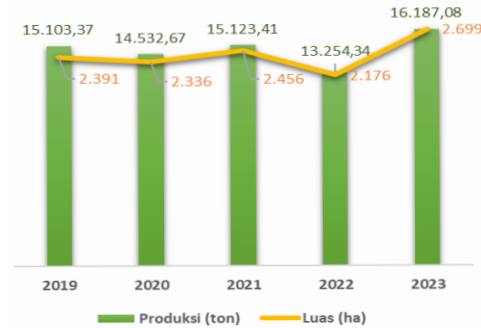
Kota Sukabumi merupakan sebuah kota terkecil ketiga (setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi) di Provinsi Jawa Barat. Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Jakarta serta 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung). Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Meskipun berada di kaki gunung, letak Kota Sukabumi cukup strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara. Dalam konstelasi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Barat yang berada di dalam jalur lintasan Jabodetabek dan Bandung Raya, Kota Sukabumi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi dan sosial kawasan. Karena itu, Kota Sukabumi sangat berpeluang dalam pengembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Di samping itu, Kota Sukabumi juga dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan investasi, konsumsi, dan distribusi bagi wilayah sekitarnya atau *hinterland*.

Produksi padi di Kota Sukabumi menunjukkan penurunan yang signifikan di tahun 2022, yaitu berkurang sekitar 1.869,07 ton. Namun pada tahun 2023, produksi padinya meningkat sebesar 2.932,74 ton (22,13 persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.2 Produksi Padi dan Luas Panen Sawah di Kota Sukabumi Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Meskipun mengalami kenaikan produksi, ancaman penurunan luas lahan sawah di Kota Sukabumi cukup besar sebagai akibat dari pembangunan kota yang makin masif. Kebutuhan ruang untuk aktivitas perdagangan dan jasa serta perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari. Kondisi demikian diperparah dengan keberadaan Jalan Tol Bocimi yang akan memberikan ancaman lebih pada keberadaan lahan sawah. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian perlu dilakukan. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada secara optimal serta menggalakkan *urban farming*.

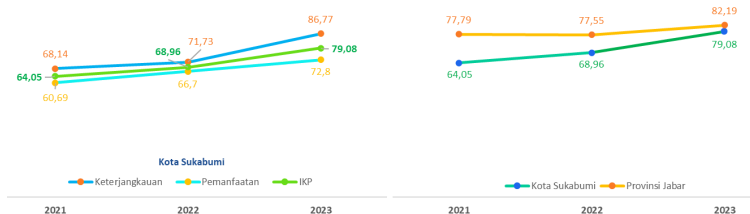
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kebutuhan air di Kota Sukabumi cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut dipenuhi dengan mengandalkan sumber dari air hujan dan air permukaan.

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kota Sukabumi memiliki jumlah curah hujan tahunan sekitar 10.528 mm pada Stasiun Ciaul 4.078 mm, pada Stasiun Cimandiri 3164 dan pada Stasiun Situmekar 3.286 mm pada tahun 2022. Jumlah volume air bersih/minimum

di Kota Sukabumi yang disalurkan oleh PDAM pada tahun 2018 sebanyak 3.495.927 m³. Untuk air permukaan Kota Sukabumi dapat dilihat berdasarkan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Cisadea. Di Kota Sukabumi terdapat 29 sungai dengan panjang total sungai 113,8 km. Sungai tersebut terdiri dari 1 induk Sungai Cimanteri dan 5 anak sungai (S. Cipelang, S. Cipanengah, S. Tonjong, S. Cisuda dan S. Ceger) dan 23 sungai-sungai kecil yang bermuara ke-5 anak sungai tersebut. Sungai-sungai tersebut memiliki kapasitas berkisar antara 17 m³/detik sampai 1.981 m³/detik. Sistem aliran sungai terdiri dari orde 1 sampai orde 4 yang semua sungai bermuara ke sungai Sungai Cimanteri.

Gambar 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin)



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2024 (diolah)

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Ketahanan pangan itu merupakan rangkaian dalam menyediakan pangan untuk masyarakat agar menghasilkan SDM yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, digunakanlah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Adapun untuk tingkat kota, aspek yang diperhitungkan yaitu keterjangkauan dan pemanfaatan. Sementara aspek ketersediaan diasumsikan dipenuhi oleh wilayah di luar kota.

IKP Kota Sukabumi cenderung meningkat dan masuk dalam kategori baik. Walaupun Kota Sukabumi berstatus kota, namun ketersediaan pangan sebagian juga dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Jika aspek tersebut dimasukkan dalam perhitungan, IKP Kota Sukabumi diperkirakan akan semakin baik.

Jika dibandingkan dengan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, IKP Kota Sukabumi hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu terus dilakukan terutama pada aspek pemanfaatan yang angkanya masih dibawah angka IKP.

2.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Sukabumi sangat peduli dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepedulian itu kemudian diganjar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tiga penghargaan kepada Kota Sukabumi di tahun 2022 lalu. Penghargaan yang diberikan adalah Nirwasita Tantra atau *Green Leadership* untuk Wali Kota Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi sebagai peringkat pertama institusi pendukung dalam perencanaan pembangunan berbasis lingkungan dan peringkat pertama perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah kategori kota sedang.

Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: DLH Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Walaupun mendapat apresiasi, permasalahan lingkungan hidup di Kota Sukabumi yang masih perlu menjadi perhatian yaitu terkait luas RTH yang masih kurang, degradasi kualitas lingkungan, kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang, dan belum optimalnya pengelolaan persampahan.

2.1.1.5 Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa. Suhu udara rata-rata berkisar 26° C - 28° C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas surah hujan di Kota Sukabumi menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri. Hujan maksimum terjadi di bulan Desember di Stasiun Cimandiri sebesar 102 mm dengan jumlah curah hujan 530 mm. Sementara jumlah hari hujan terbanyak adalah 25 hari yang terjadi di bulan Maret dan Desember.

Fenomena perubahan iklim di Kota Sukabumi sudah mulai terasa dampaknya dan jika dibiarkan akan semakin memperburuk kondisi lingkungan. Terdapat beberapa sumber emisi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim di Kota Sukabumi, antara lain dari penggunaan lahan, pertanian, peternakan, persampahan, limbah cair, dan energi transportasi. Sumber emisi tersebut secara kumulatif menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 9.355,39 Ton CO₂eq pada tahun 2021 dan 20.239,52 Ton Co₂eq di tahun 2022 dan 2023.

Wilayah Kota Sukabumi berisiko terhadap berbagai ancaman bencana. Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi tahun 2019-2023 menunjukkan tren menurun, yaitu dari angka 114,40 di tahun 2019 menjadi 84,55 di tahun 2023. Artinya, Kota Sukabumi berada pada kelas risiko sedang.

Risiko bencana yang ada di Kota Sukabumi tersebut antara lain:

1. Gempa bumi

Adanya sesar Cimandiri yang membentuk gawir sepanjang 100 km dari Padalarang hingga Pelabuhan Ratu yang terbagi menjadi tiga segmen menyebabkan Kota Sukabumi rawan terhadap gempa bumi.

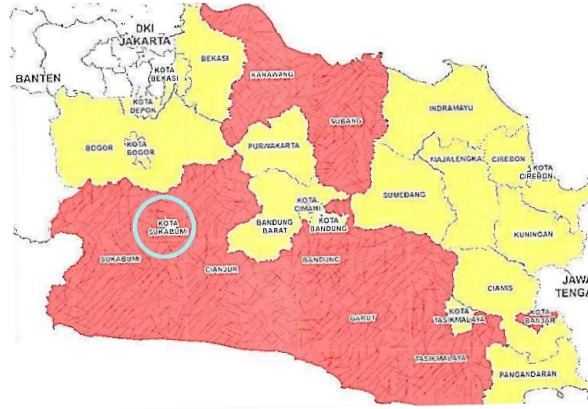
2. Tanah longsor

Potensi bencana longsor yang bersifat lokal tersebar di bagian utara Kota Sukabumi meliputi Kelurahan Subangjaya, Cisarua dan Karangtengah. Pada bagian selatan Kota Sukabumi petensi longsor berada di Kelurahan Lembursitu dan sebagian di Kelurahan Situmekar, Cikundu, Jayamekar, dan Limusnunggal.

3. Gunung api

Ancaman bencana gunung api yaitu berupa aliran lahar dari Gunung Gede dan Pangrango yang mengalir melalui Sungai Cibeureum, Cipelang, dan Cigunung.

Gambar 2.5 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BNPB, 2024

4. Banjir

Berdasarkan peta potensi banjir, hampir seluruh wilayah Kota Sukabumi berada pada ancaman bencana banjir.

5. Cuaca ekstrem

Ancaman cuaca ekstrem tinggi di Kota Sukabumi berada di 22 kelurahan. Adapun ancaman cuaca ekstrem rendah berada di 6 kelurahan.

6. Kebakaran

Tingkat bahaya kebakaran tinggi di Kota Sukabumi hanya berada di Kelurahan Nyomplong dan Karang Tengah.

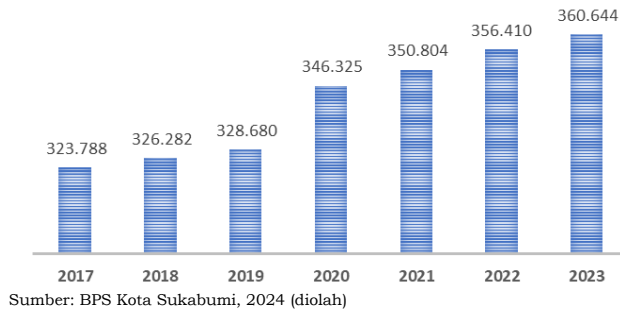
Adanya risiko bencana tersebut, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu diukur dengan Indeks Kapasitas Bencana Daerah. Indeks Kapasitas Bencana Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 menunjukkan tren meningkat yaitu dari 0,51 menjadi 0,57. Artinya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masuk ke dalam kelas kapasitas sedang.

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Sukabumi cenderung bertambah setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk terbanyak yaitu di tahun 2020 dimana pertambahannya mencapai 17.645 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga penduduk yang merantau kembali ke Kota Sukabumi dengan berbagai pertimbangan.

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2017-2023 (Jiwa)



Tabel 2.1 Jumlah (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen) Per Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2020-2023

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2023
	2020	2021	2022	2023 (ribu)	
Baros	37.734	38.576	39.548	40,38	2,50
Lembursitu	41.432	42.196	43.098	43,84	2,08
Cibeureum	44.961	46.025	47.247	48,31	2,64
Citamiang	53.049	53.517	54.154	54,57	1,03
Warudoyong	58.972	59.511	60.236	60,72	1,07
Gunung Puyuh	48.292	48.685	49.230	49,58	0,96
Cikole	61.885	62.294	62.897	63,24	0,79
Kota Sukabumi	346.325	350.804	356.410	360,64	1,48

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk Kota Sukabumi tahun 2020-2023 sebesar 1,48 persen. Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Lembursitu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Hal ini dipengaruhi

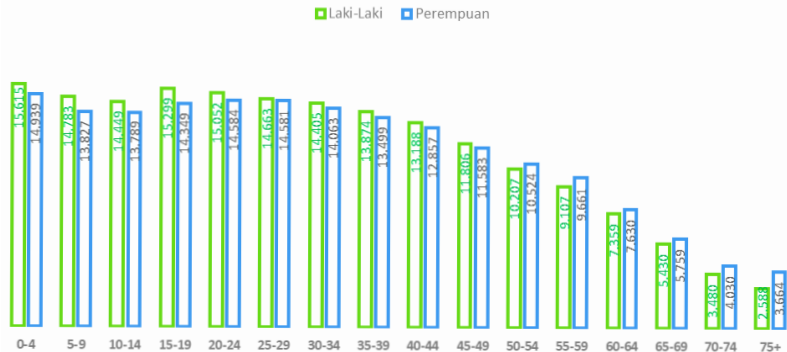
oleh kondisi geografis, dimana tiga kecamatan tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan sebagai wilayah pemukiman.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2023 sebesar 7.465 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Lembursitu menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2023 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan piramida penduduk di Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki laki sebanyak 181.305 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 179.339 jiwa.

Gambar 2.7 Komposisi Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2023 (Jiwa)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Dari komposisi penduduk Kota Sukabumi tahun 2023, sebanyak 248.291 jiwa atau 68,85 persen berada pada usia produktif (15-64 tahun). Ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi berada di masa bonus demografi. Hal ini juga dikuatkan bahwa persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 91,47 persen.

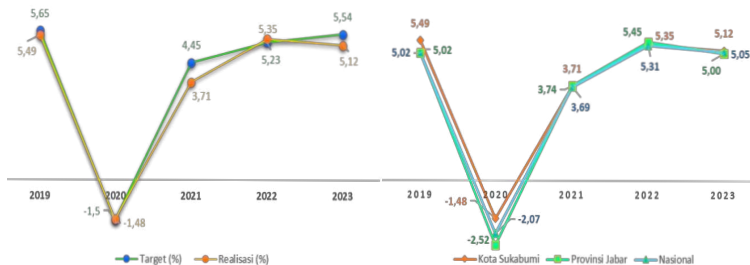
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Gambar 2.8 LPE Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Di tahun 2023 perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif, namun mengalami perlambatan kecepatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,12 persen. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan dominan, tampak berbeda antartahun. Jika di tahun 2021, lapangan usaha M,N (Jasa Perusahaan) tampil mendominasi, maka di tahun 2022 lapangan usaha R,S,T,U (Jasa Lainnya) adalah yang tertinggi dibanding yang lain dan lapangan usaha H (Transportasi) memiliki pertumbuhan yang tertinggi untuk tahun 2023.

Walaupun luas wilayah yang kecil, tidak memiliki kekayaan alam, jumlah lapangan kerja yang terbatas, dan kualitas tenaga kerja yang relatif masih rendah, Kota Sukabumi masih menunjukkan kinerja ekonomi yang

baik. Hal ini dapat di lihat dari LPE pada kurun waktu 2019-2020 dan tahun 2023 yang lebih tinggi dari LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Meskipun di tahun 2021 dan 2022 LPE Kota Sukabumi masih di bawah LPE Provinsi Jawa Barat.

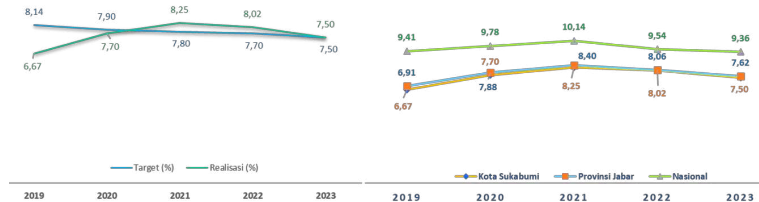
Tahun 2021 merupakan tahun resiliensi sebagai kunci utama bangkit dari pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan berbagai kebijakan dan program dalam rangka memulihkan ekonomi seperti *government spending strategy*. Selain itu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi yang mendorong investasi serta kapasitas fiskal.

2.2.1.2 Kemiskinan

Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2023 sekitar 24,96 ribu jiwa atau 7,50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2019 dan 2020. Kota Sukabumi berhasil menangani kemiskinan dengan pencapaian yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan tahun 2022. Capaian tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2023 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.9 Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang

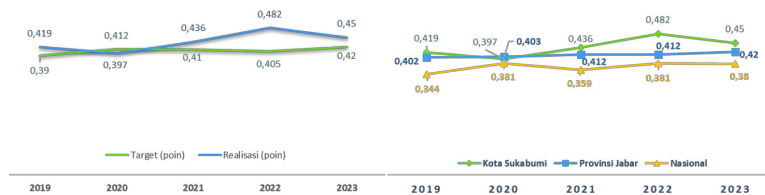
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

2.2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2023 mencapai 5,12 persen, namun Indeks Gini mengalami kenaikan dan jauh diatas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2023 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Gambar 2.10 Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

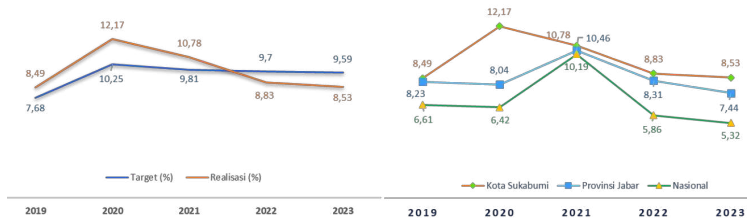
Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan

seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dari 8,83 persen di tahun 2021 menjadi 8,53 persen di tahun 2023. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 26,64 persen di tahun 2023.

Gambar 2.11 TPT Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



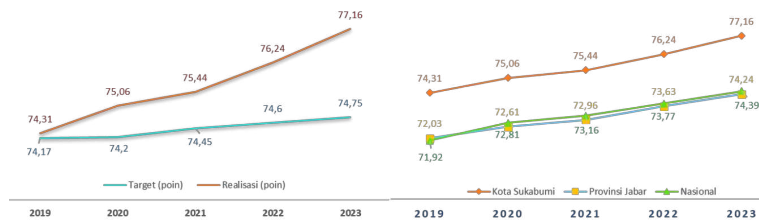
Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Meskipun TPT Kota Sukabumi mengalami penurunan, namun TPT Kota Sukabumi di tahun 2023 masih berada diatas angka TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan di Kota Sukabumi seperti jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja serta belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja.

2.2.1.5 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Di mana untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Kedua aspek itu, yakni kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode.

Gambar 2.12 IPM Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Tabel 2.2 Komponen IPM Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	72,26	74,23	74,38	74,64	74,89
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,47	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,58	9,59	9,81	10,14	10,37
Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan	Ribu Rupiah	11.204	10.999	10.942	11.229	11.999
IPM	Indeks	74,31	75,06	75,44	76,24	77,16

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

IPM Kota Sukabumi di tahun 2023 masuk dalam kategori tinggi (interval 70-79 poin). Naik cukup signifikan sekitar 0,92 poin dari 76,24 di tahun 2022 menjadi 77,16 di tahun 2023. Kenaikan IPM terjadi pada semua komponen yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Namun, kenaikan pada komponen harapan lama sekolah masih belum optimal karena hanya naik 0,01 poin.

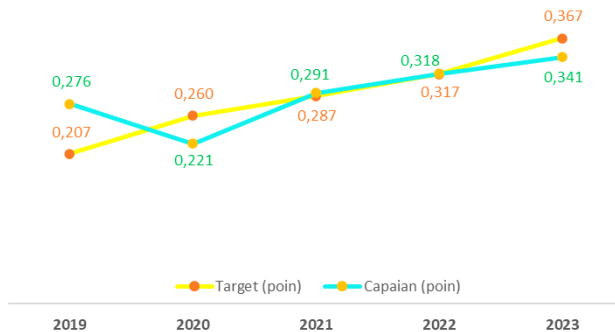
Jika dilihat perkembangan dari tahun 2019-2023, IPM Kota Sukabumi masih lebih baik jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Di antara kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, IPM Kota Sukabumi tahun 2023 berada di peringkat 7. Namun jika dilihat hanya kategori kota, dari 9 kota di Provinsi Jawa Barat, peringkat IPM Kota Sukabumi hanya lebih baik dari IPM Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. IPM Kota Sukabumi masih bisa lebih baik lagi asalkan 4 komponen pembentuk IPM diintervensi dengan tepat dan dilaksanakan oleh lintas urusan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu fokus capaian pembangunan nasional di bidang kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga sehat adalah pondasi masa depan bangsa yang gemilang.

Gambar 2.13 Indeks Keluarga Sehat Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Dinkes Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Menurut WHO, keluarga sehat berarti keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 IKS. Dengan menerapkan 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes, maka diharapkan banyak dari keluarga yang ada di Indonesia memiliki standar kesehatan yang optimal.

Secara umum status kesehatan keluarga di Kota Sukabumi cenderung mengalami perbaikan. Hal ini juga tercermin dengan jumlah keluarga tidak sehat dan pra sehat yang berkurang. Selain itu, meningkatnya pelayanan puskesmas juga menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan IKS. Untuk lebih meningkatkan IKS perlu dilakukan penguatan, pendampingan, dan monitoring terhadap puskesmas yang belum mencapai target, penguatan kerja sama tim lintas program, dan optimalisasi keterlibatan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, organisasi profesi ataupun pihak swasta.

2.2.2.2 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH di Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dan mencapai angka 74,89 di tahun 2023.

Gambar 2.14 UHH Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

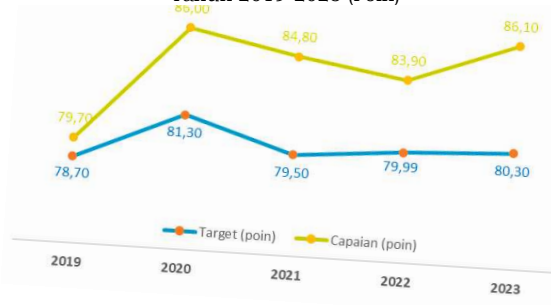
Semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi yang ditunjukkan dengan UHH merupakan salah satu indikator yang menentukan IPM. Hal ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas kesehatan penduduk utamanya pada kalangan bayi, balita, wanita berusia subur, dan lansia.

Meskipun capaian UHH Kota Sukabumi cenderung meningkat setiap tahun, namun masih di bawah UHH Provinsi Jawa Barat. Karena itu, upaya untuk lebih meningkatkan UHH Kota Sukabumi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut seperti dengan meningkatkan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka warga yang sakit.

2.2.2.3 Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif maka diperlukan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH) dalam jumlah dan komposisi yang cukup.

Gambar 2.15 Skor Pola Pangan Harapan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Skor PPH Kota Sukabumi sempat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020, namun menurun pada tahun 2021. Karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan Skor PPH Kota Sukabumi perlu dilakukan dengan menyusun analisis PPH Konsumsi, pelatihan pengolahan pangan lokal, distribusi bibit/benih tanaman hortikultura yang mendukung peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, pelatihan teknologi *urban farming* yang mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, sosialisasi gerakan konsumsi pangan B2SAH,

pembinaan/fasilitasi dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan, subsidi harga pada acara Gelar Pangan Murah Kota Sukabumi, subsidi harga dan dipasarkan melalui PMT (Pasar Mitra Tani), rapat koordinasi distribusi pangan, vaksinasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan AI untuk mencegah penularan zoonosis, dan fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan.

2.2.2.4 Kualitas Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak.

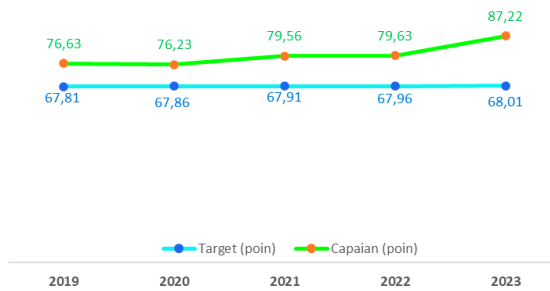
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, IPA di Kota Sukabumi tahun 2022 yaitu 65,70. Angka ini termasuk terendah jika dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Jika ditelusuri per kluster, dari 5 kluster yang ada terdapat 2 kluster nilainya yang masih rendah yaitu kluster hak sipil dan kebebasan (48,00) dan kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (41,13).

Untuk meningkatkan upaya perlindungan anak di Kota Sukabumi diperlukan pelaksanaan strategi yang dibarengi pelaksanaan program/kegiatan yang lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah (level kecamatan). Kebutuhan akan pemenuhan dan perlindungan anak antara satu wilayah dengan wilayah lain tentunya akan berbeda. Karena itu, intervensi yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah diharapkan lebih tepat sasaran dalam memenuhi dan melindungi anak.

2.2.2.5 Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan hal penting yang mencerminkan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material, dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Gambar 2.16 Indeks Ketahanan Keluarga Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



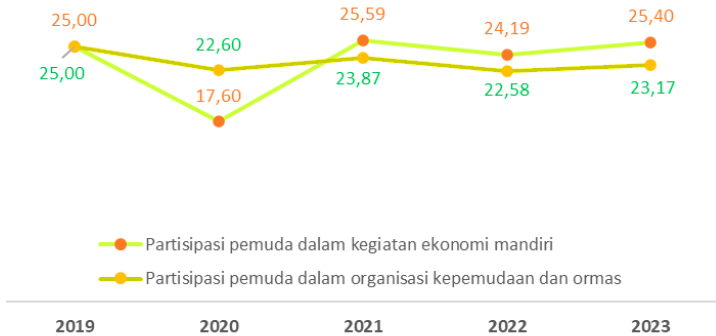
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Jika dilihat trennya, Indeks Ketahanan Keluarga Kota Sukabumi sudah masuk dalam kategori sangat tinggi (>75). Bahkan melebihi angka Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus tetap diperhatikan untuk lebih meningkatkan angka indeks tersebut. Antara lain perlunya peningkatan pada aspek pendidikan, penghasilan keluarga, kemampuan membeli rumah, menjaga keutuhan keluarga (menghindari perceraian dan kerja jauh), menjaga HH-Size di angka 4-6 (misalnya orang tua dengan 2 anak), mengupayakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki, dan memperhatikan kelompok usia lansia awal-akhir dan manula.

2.2.2.6 Pembangunan Pemuda

Peran pemuda sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa dan pemuda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif dan juga memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Pemuda itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Gambar 2.17 Tingkat Partisipasi Pemuda Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



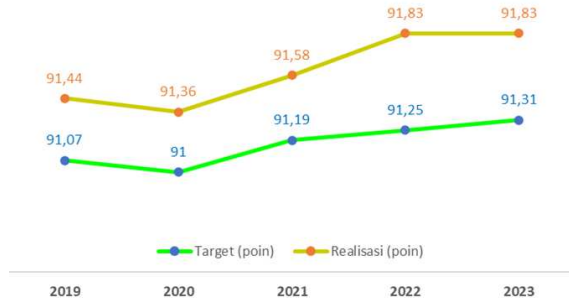
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Tingkat partisipasi pemuda Kota Sukabumi dalam pembangunan menunjukkan angka di atas 20 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat partisipasi tersebut mencakup dalam kegiatan ekonomi mandiri serta organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mengingat jumlah pemuda di Kota Sukabumi saat ini jumlahnya paling besar maka upaya optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan perlu menjadi perhatian. Upaya tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemuda dan peningkatan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

2.2.2.7 Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Gambar 2.18 IPG Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)

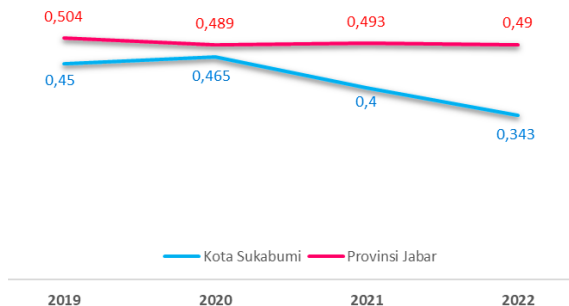


Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Tren IPG di Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kota Sukabumi tahun 2023 sebesar 91,83 poin. Ini berarti bahwa pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Sukabumi semakin mendekati setara (setara jika nilai IPG 100). Perkembangan IPG Kota Sukabumi dari tahun ke tahun juga masih lebih baik dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG Kota Sukabumi tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik yaitu 0,343 yang artinya masuk dalam kategori rendah. Angka tersebut menempatkan Kota Sukabumi berada di peringkat lima diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.19 IKG Kota Sukabumi Tahun 2019-2022 (Poin)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Keberhasilan pencapaian diatas tidak lepas dari kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi yang telah dijalankan. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender di Kota Sukabumi seperti Pos Mama atau posyandu mapay imah atau kader posyandu menyusuri rumah warga, *Homecare* atau perawat yang di tempatkan di 33 kelurahan untuk mendatangi rumah warga yang alami gangguan kesehatan, dan lainnya.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar Rp 8,53 triliun. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp 9,32 triliun di tahun 2022 dan Rp 9,80 triliun di tahun 2023. Adapun distribusi PDRB tertinggi tahun 2023 yaitu dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (39,90 persen), jasa keuangan dan asuransi (10,11 persen), serta transportasi dan pergudangan (9,31 persen).

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, kontribusi PDRB Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 0,58 persen. Kontribusi tersebut masih lebih baik jika dibandingkan Kabupaten Pangandaran (0,54 persen) dan Kota Banjar (0,2 persen).

Tabel 2.3 PDRB ADHK Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	273,28	274,97	277,05	286,97	307,55
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	457,12	448,37	459,55	481,63	503,98
Pengadaan Listrik dan Gas	15,14	15,59	16,99	18,00	18,57
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,16	10,86	11,73	12,47	12,73
Konstruksi	602,81	578,34	601,49	600,60	641,76
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.542,09	3.447,12	3.572,48	3.767,92	3.911,06

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
Transportasi dan Pergudangan	808,28	751,89	777,52	836,52	912,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,66	241,16	247,78	271,81	293,05
Informasi & Komunikasi	445,79	493,86	534,52	571,97	607,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	867,55	891,90	934,62	958,67	990,62
Real Estate	109,06	108,13	116,52	123,86	130,72
Jasa Perusahaan	146,25	135,03	145,66	158,96	171,74
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	352,51	338,66	329,32	328,20	334,99
Jasa Pendidikan	320,42	334,49	344,12	371,97	393,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,38	168,39	181,55	199,43	210,84
Jasa Lainnya	298,40	295,94	300,15	335,16	360,99
TOTAL PDRB	8.664,012	8.534,72	8.851,05	9.324,16	9.801,88

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024

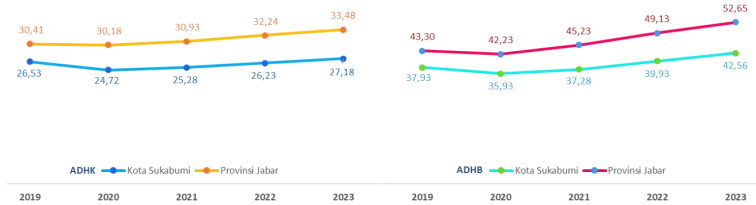
Jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2023. Adapun 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu transportasi dan pergudangan (9,08 persen), jasa perusahaan (8,04 persen) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (7,81 persen).

Secara khusus, terdapat dua lapangan usaha yang menjadi arahan untuk dikembangkan dalam rangka transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kedua lapangan usaha itu yaitu industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan kedua lapangan usaha tersebut menunjukkan tren yang terus bertumbuh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2023 yaitu 4,9 persen. Sementara itu, rasio lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB sebesar 3,15 persen.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita selain menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga menggambarkan produktivitas masyarakatnya. Semakin tinggi produktivitas masyarakat yang ditunjukkan dengan PDRB Per Kapita mencerminkan juga daya saing wilayah tersebut dengan wilayah lainnya.

Gambar 2.20 PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

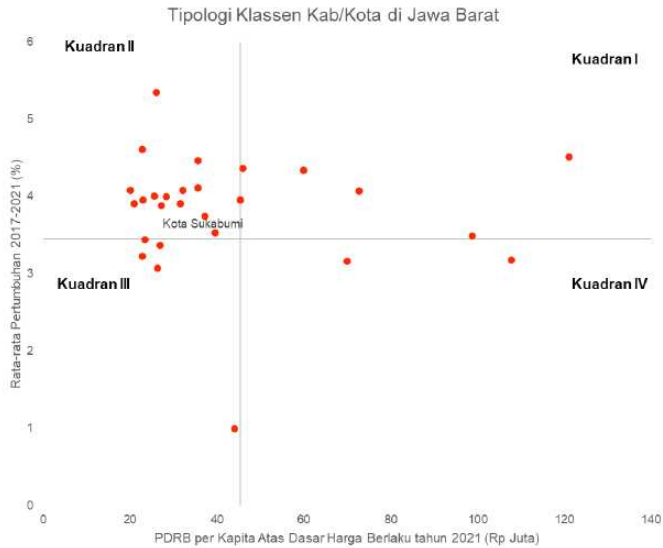
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi baik ADHK dan ADHB menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya Covid-19 yang melanda yang menyebabkan LPE Kota Sukabumi berkontraksi hingga -1,48 persen. Seiring membaiknya kondisi ekonomi, PDRB Per Kapita juga semakin meningkat. Untuk meningkatkan secara signifikan PDRB Per Kapita, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti: meningkatkan nilai output produksi barang dan jasa; meningkatkan efisiensi dan produktivitas barang dan jasa; meningkatkan investasi SDM agar kualitas tenaga kerja semakin meningkat; pengembangan infrastruktur untuk menunjang efisiensi produksi; dan mendorong investasi daerah.

2.3.1.3 Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial

Berdasarkan Tipologi Klassen yang digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja dalam empat kuadran, Kota Sukabumi berada di posisi kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi termasuk daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis LQ pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 11 sektor basis yang dapat mendorong perekonomian daerah. Sektor basis, artinya kontribusi sektor tersebut di wilayah Sukabumi lebih besar kontribusinya dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lain di Jawa Barat, dimana sektor tersebut mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Adapun sektor yang paling potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi yaitu sektor Konstruksi serta Jasa Keuangan dan Asuransi.

Gambar 2.21 Tipologi Klassen



Sumber: Laporan *Background Study* RPJPD, 2023

Sementara itu, berdasarkan analisis *Shift Share* pada periode tahun 2017-2021, Kota Sukabumi memiliki 10 sektor yang termasuk kompetitif dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya. Sektor yang memiliki nilai kompetitif tertinggi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

2.3.1.4 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan sebuah konsep pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, serta ramah lingkungan. Ukuran yang

digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi hijau yaitu Indeks Ekonomi Hijau Daerah.

Indeks Ekonomi Hijau pada prinsipnya mencakup tiga pilar (Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Lingkungan). Namun menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan ke depan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kabupaten/kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi.

Gambar 2.22 Indeks Ekonomi Hijau Kota Sukabumi Tahun 2023-2024



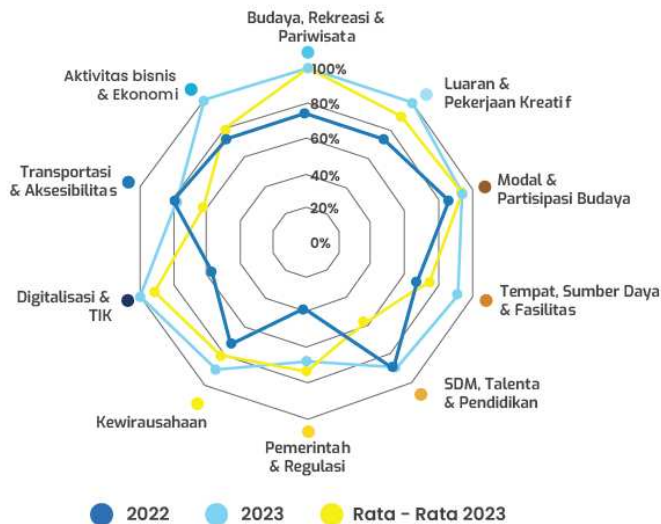
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Skor Indeks Ekonomi Hijau Kota Sukabumi tahun 2023-2024 berada pada level Baik Tier 2 yaitu berada pada kisaran 65,51 - 75,00. Hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas aquakultur Kota Sukabumi sudah optimal, sementara sektor lain yaitu produktivitas padi, produktivitas tenaga kerja industri, produktivitas tenaga kerja jasa dan PDRB per kapita masih perlu ditingkatkan.

2.3.1.5 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif Kota Sukabumi menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung dengan generasi produktif Kota Sukabumi sebesar 53,33 persen di tahun 2022, maka jumlah pelaku ekonomi kreatif sudah meningkat lebih dari 500 pelaku yang terdata. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang teraktivasi, terdapat 4 subsektor yang paling potensial, yaitu kuliner, musik, seni pertunjukan, dan kriya.

Gambar 2.23 *Spider Chart* Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2022-2023



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2024

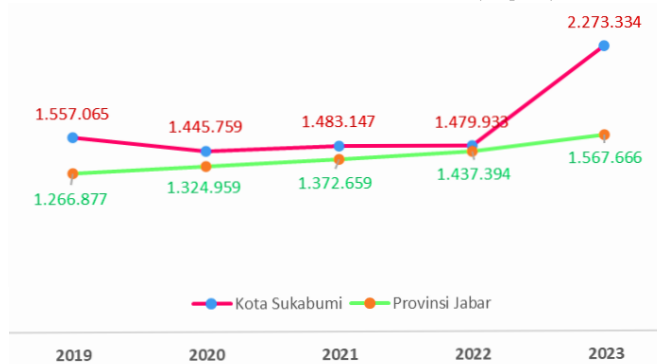
Sektor ekonomi kreatif di Kota Sukabumi masih perlu diperkuat agar menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan dan kesenjangan di Kota Sukabumi. Karena itu, keberadaan Sukabumi Creative Hub yang merupakan komite akselerasi, penataan, dan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat mendorong kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam melahirkan kreativitas dan inovasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depannya, ekonomi kreatif juga diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi baru di Kota Sukabumi.

2.3.1.6 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sukabumi mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian, pengeluaran per kapita masyarakat mengalami kenaikan di tahun 2021

dan sedikit menurun kembali di tahun 2022. Namun angka tersebut meningkat sebesar 53,61 persen menjadi Rp 2.273.334,- di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.24 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Rupiah)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Konsumsi masyarakat secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran konsumsi untuk kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2023, masyarakat Kota Sukabumi mengalokasikan anggarannya sebanyak 38,86 persen untuk konsumsi makanan dan sebanyak 61,14 persen untuk pengeluaran konsumsi non makanan.

Adapun lima jenis komoditas makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah makanan dan minuman jadi, rokok, padi-padian, daging, telur dan susu. Sementara kelompok non makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta subkelompok aneka barang dan jasa.

2.3.1.7 Investasi

Hingga November 2022, sebanyak 4.488 usaha di Kota Sukabumi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan, terlebih pengurusan perizinan dipermudah dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Untuk mendukung hal itu, berbagai inovasi kemudahan layanan terus diluncurkan oleh

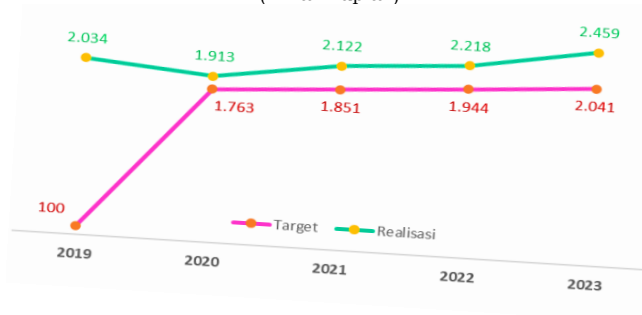
Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui aplikasi Si Jimat Boss (sistem jemput perijinan masyarakat bersama OSS). Sistem jemput bola perijinan langsung ke masyarakat ini sebetulnya sudah berjalan. Hanya saja, untuk OSS agak sedikit sulit karena tidak bisa digabung dengan program yang lainnya.

Laju perkembangan investasi dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), nilai investasi tahun 2022 mencapai Rp 3,322 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 25.353 orang dengan jumlah 6.287 perusahaan, terdiri dari mikro mencapai 5.996 perusahaan, perusahaan kecil (PK) sebanyak 234, perusahaan menengah (PM) mencapai 36, dan perusahaan besar (PB) sebanyak 21.

2.3.1.8 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Informasi tentang PMTB, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan di suatu wilayah dari tahun ke tahun. Manfaatnya bagi pemerintah daerah adalah sebagai acuan mengambil kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan iklim investasi.

Gambar 2.25 PMTB Kota Sukabumi Tahun 2019-2023
(Miliar Rupiah)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

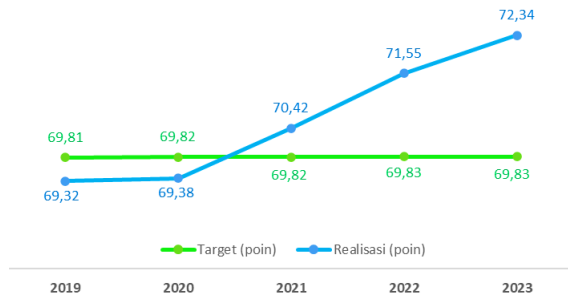
PMBT Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan cenderung meningkat.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun IPM. Indeks Pendidikan terdiri dari komponen indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Jika dibandingkan dengan Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi termasuk terendah. Di mana kedua indeks lainnya berada diatas angka 80.00 poin.

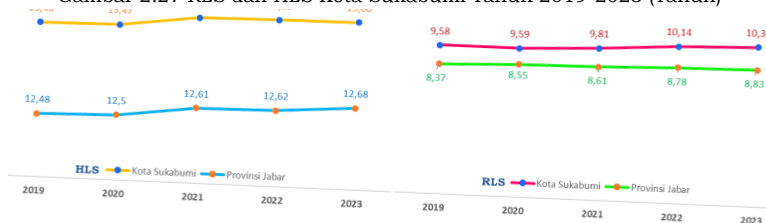
Gambar 2.26 Indeks Pendidikan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Jika dilihat trennya, Indeks Pendidikan Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan ini berkorelasi dengan variabel pembentuknya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kota Sukabumi pada tahun 2023 adalah 10,30. Artinya rata-rata masyarakat Kota Sukabumi pendidikan terakhirnya adalah setara dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Gambar 2.27 RLS dan HLS Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Sementara itu, HLS Kota Sukabumi pada tahun 2022 mencapai 13,60 tahun, meningkat 0,01 poin dari angka HLS tahun 2022. Angka HLS sebesar 13,59 tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Kota Sukabumi sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja urusan pendidikan sudah makin membaik.

Untuk lebih meningkatkan Indeks Pendidikan di Kota Sukabumi tentunya harus ditingkatkan juga RLS dan HLS. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting untuk meningkatkan angka Indeks Pendidikan. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar formal maupun nonformal/kesetaraan, bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu, dan pemberdayaan satuan pendidikan nonformal berbasis masyarakat. Jika hal-hal tersebut dilakukan dengan tepat maka Indeks Pendidikan Kota Sukabumi akan tetap berada di atas Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

2.3.2.2 Literasi/Numerasi

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan peningkatan dan masuk dalam kategori BAIK. Itu artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 2.4 Rata-rata Kemampuan Literasi/Numerasi Siswa Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin)

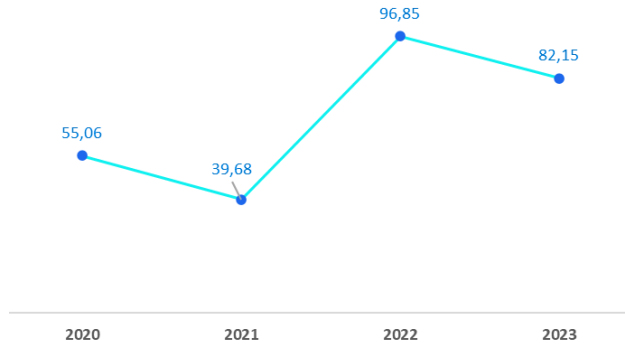
URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
Sekolah Dasar	48.55	34,88	53.67	38.27	56.6	41.54
Sekolah Menengah Pertama	59.24	53.20	68.64	55.98	69.92	57.83

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, 2024

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi seperti pada tabel diatas, rata rata kemampuan numerasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen Nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori SEDANG. Itu artinya 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Karena itu, perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik Kota Sukabumi untuk mencapai kompetensi minimum. Adapun upaya yang perlu dilakukan antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Seiring meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang makin membaik meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi yang perlu terus menjadi perhatian yaitu terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat di tengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, dan terbatasnya pustakawan.

Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 (Poin)

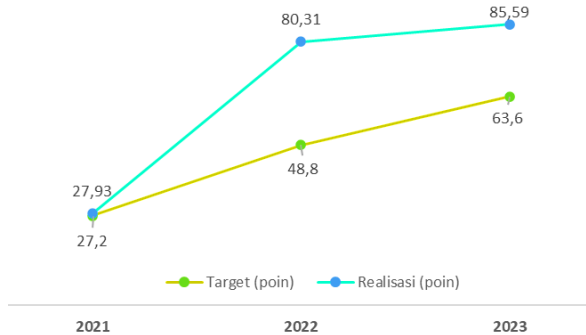


Sumber: Dispusip Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

2.3.2.3 Kreativitas

Kota kreatif identik dengan kreativitas masyarakatnya. Semakin kreatif, semakin kompetitif kota tersebut. Para pemangku kepentingan di kota itu tentunya memiliki pemahaman tentang apa yang menjadi kekuatan yang akan membedakannya dengan kota lainnya. Secara umum, kota kreatif ditandai dengan karakter yang terbuka, memiliki jejaring yang luas, masyarakat yang cair dan dinamis, selalu terbuka dengan hal-hal baru serta mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide kontemporer.

Gambar 2.29 Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2021-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

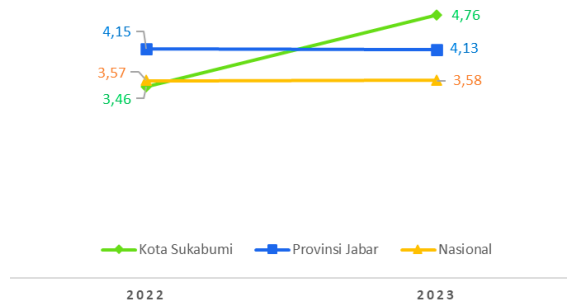
Indeks Kota Kreatif mulai diterapkan di Kota Sukabumi sejak tahun 2021. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sukabumi memiliki potensi industri kreatif yang menjanjikan. Pengembangan Kota Kreatif di Kota Sukabumi dilakukan dengan kolaborasi *Penta Helix* yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah dan media.

Agar Indeks Kota Kreatif Kota Sukabumi lebih baik lagi, maka perlu upaya kolaborasi berbagai pihak seperti dengan akademisi untuk pengembangan SDM melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan pelaku usaha atau bisnis yang memiliki peranan sebagai pencipta produk dan jasa kreatif, kolaborasi dengan komunitas kreatif seperti Sukabumi Creative Hub (SCH) untuk mewadahi pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan yang diadakan oleh komunitas.

2.3.2.4 Adopsi Teknologi Informasi

Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Salah satu cara mengukur penggunaan TIK yaitu dengan melihat tingkat adopsi TIK atau tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.

Gambar 2.30 Adopsi Teknologi Informasi Kota Sukabumi Tahun 2022-2023 (Poin)



Sumber: BRIN, 2024 (diolah)

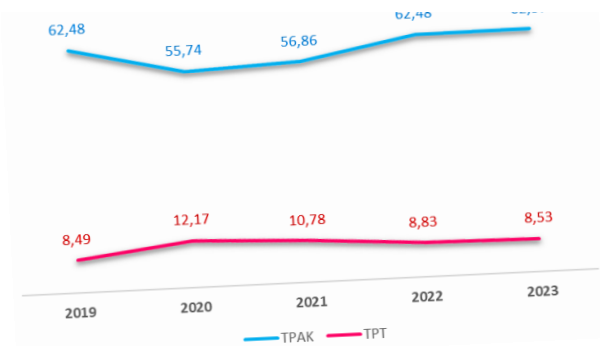
Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada pilar ketiga disebutkan tentang adopsi TIK. Untuk Kota Sukabumi, skor adopsi TIK mengalami kenaikan signifikan di tahun 2023 yaitu sebesar 1,3 poin. Skor adopsi TIK Kota Sukabumi di tahun 2023 juga lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Bahkan diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, skor tersebut berada pada peringkat ketujuh bersama Kota Cirebon.

Skor adopsi TIK yang sudah tinggi tersebut perlu didukung dengan ekosistem digital yang memadai. Dengan demikian, kumpulan teknologi informasi yang saling terintegrasi dan terkait dapat digunakan sebagai kesatuan yang utuh. Sistem yang terbentuk kemudian dapat digunakan dan diisi oleh banyak pihak dalam bisnis, mulai dari pelanggan, pemasok, penyedia data, pihak pemerintah melalui dinas terkait, berbagai bentuk layanan dari bisnis lain, dan lain sebagainya.

2.3.2.5 Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu daerah yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. TPAK di Kota Sukabumi cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi pasca Covid-19. TPAK ini berkorelasi dengan TPT, dimana ketika TPAK mengalami peningkatan TPT cenderung menurun.

Gambar 2.31 TPAK dan TPT Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Jika dicermati lebih dalam, gap antara TPAK laki-laki dengan perempuan di Kota Sukabumi cukup lebar. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 79,75 persen, sementara TPAK perempuan hanya 44,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas perekonomian masih kurang.

Tabel 2.5 Penduduk Bekerja Kota Sukabumi Tahun 2020-2023

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS 2020		AGUSTUS 2021		AGUSTUS 2022		AGUSTUS 2023	
	Ribu	%	Ribu	%	Ribu	%	Ribu	%
Pertanian	4,91	4,01	5,47	4,26	6,09	4,19	6,4	4,08
Manufaktur	29,64	24,16	31,9	24,85	35,22	24,2	39,44	25,16
Jasa	88,11	71,83	91,02	70,89	104,21	71,61	110,92	70,76
Kota Sukabumi	122,66	100	128,39	100	145,52	100	156,76	100

Sumber: Susenas, 2024

Sementara itu, jumlah penduduk Kota Sukabumi yang bekerja pada lapangan usaha utama cenderung mengalami peningkatan. Dari tiga lapangan usaha utama, penduduk Kota Sukabumi banyak bekerja di sektor jasa yaitu mencapai 70,76 persen pada tahun 2023. Hal ini menegaskan bahwa lapangan usaha dominan yang ada di Kota Sukabumi berada pada sektor perdagangan dan jasa,

2.3.2.6 Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi pada tahun 2023 sebesar 45,25 persen, dimana setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung sebanyak 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal itu menandakan bahwa Kota Sukabumi sedang memasuki periode terbaik bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif tentu harus dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan peluang bagi Kota Sukabumi untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

Tabel 2.6 Rasio Ketergantungan Kota Sukabumi Tahun 2020-2023

JUMLAH PENDUDUK	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
0-14	86.687	86.882	87.056	87.402
15-64	237.199	241.313	245.156	248.291
>65	20.942	22.609	24.198	24.951
Rasio Ketergantungan (%)	45,37	45,37	45,38	45,25

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur

2.3.3.1 Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi.

Gambar 2.32 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2020-2023 (Persen)



Sumber: Dinas PUPR Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

IKLI Kota Sukabumi sudah masuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

2.3.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat, yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan bisa dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

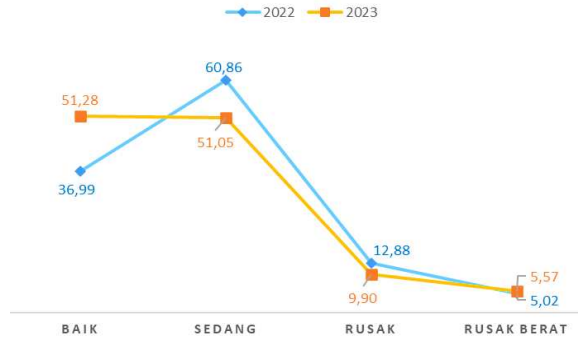
Tabel 2.7 Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kota Sukabumi Tahun 2020-2022 (Km)

JALAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Negara	8,50	8,50	8,80	8,80
Provinsi	33,55	33,55	37,74	33,18
Kota	115,79	115,79	115,74	117,80
Total (km)	157,79	157,79	162,29	159,78

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Tingkat kemantapan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Ada sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik. Sedangkan untuk sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan.

Gambar 2.33 Kondisi Jalan di Kota Sukabumi Tahun 2023 (Km)



Sumber: Dinas PUPR, 2024 (diolah)

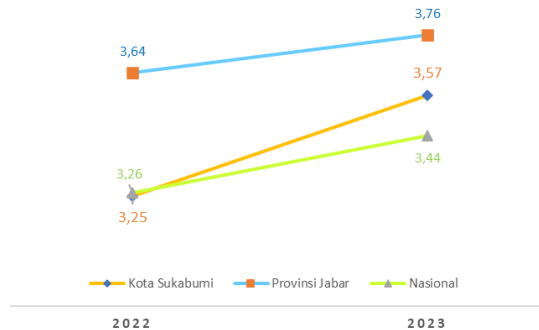
Meskipun saat ini secara persentase kemantapan jalan belum bisa 100 persen. Tapi, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Kondisi sarana jalan itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan. Kondisi jalan itu sendiri tidak akan mungkin bisa 100 persen. Tapi, setidaknya bisa mendekati ke angka tersebut.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Daya Saing Daerah

Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangatlah penting. Dalam konteks ini, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat dijadikan alat untuk memahami kondisi daya saing suatu daerah, yaitu kondisi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, tingkat efisiensi pasar, dan ekosistem inovasi.

Gambar 2.34 IDSD Kota Sukabumi Tahun 2022-2023 (Poin)



Sumber: BRIN, 2024 (diolah)

IDSD Kota Sukabumi menunjukkan peningkatan di tahun 2023 dengan capaian 3,57 poin. Meskipun meningkat, IDSD Kota Sukabumi masih di bawah Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan kota-kota di Jawa Barat, IDSD Kota Sukabumi masih lebih baik dari Kota Cimahi (3,45) dan Kota Banjar (3,52).

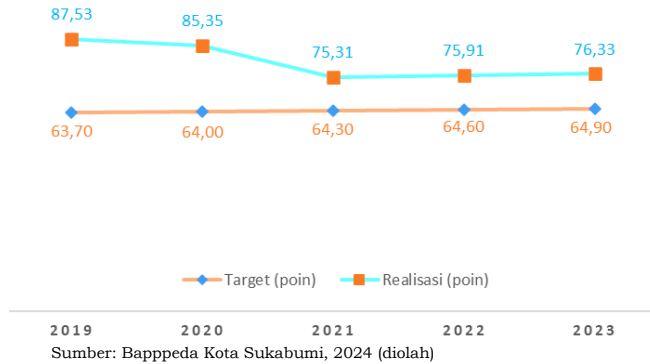
Dari 12 pilar yang membentuk IDSD Kota Sukabumi, terdapat 5 pilar yang capaiannya masih di bawah 3,00, yaitu pilar infrastruktur (2,45), pilar stabilitas ekonomi makro (2,48), pilar sistem keuangan (2,88), pilar dinamisme bisnis (2,48), dan pilar kapabilitas inovasi (2,77). Agar daya saing daerah Kota Sukabumi meningkat diperlukan intervensi yang spesifik terhadap pilar-pilar yang capaiannya masih rendah tersebut.

2.3.4.2 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Iklim investasi yang positif dapat dilihat dari tingkat keamanan dan ketertiban yang ada serta kemudahan regulasi. Tingkat keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari upaya penanggulangan pelanggaran perda dan unjuk rasa yang mencapai 100 persen. Artinya walaupun terdapat

pelanggaran perda dan unjuk rasa, pemerintah Kota Sukabumi dapat menanggulangnya sehingga kondusivitas tetap terjaga.

Gambar 2.35 Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)

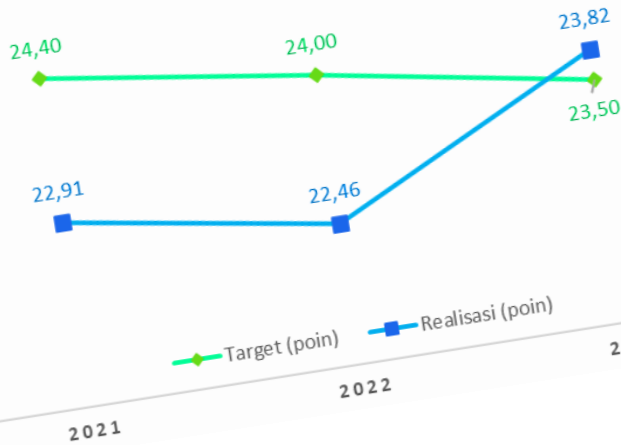


Selain itu, tingkat keamanan Kota Sukabumi yang diukur dari Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan Umat Beragama juga menunjukkan hasil yang dapat mendukung iklim investasi. Untuk Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Walaupun tingkat rasa aman di Kota Sukabumi ini berada pada level “Aman” ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan, yaitu terkait partisipasi warga dalam kegiatan simulasi bencana, sosialisasi dan optimalisasi petunjuk keselamatan bencana, peningkatan akses warga terhadap lembaga/institusi pengembangan diri, dan masih terdapatnya kejadian kriminalitas (pencurian, perampasan, penganiayaan) serta kekerasan komunal (tawuran, perkelahian Ormas).

2.3.4.3 Kenyamanan

Kota Layak Huni adalah kota yang memiliki lingkungan dan atmosfer yang nyaman sebagai tempat untuk hidup dan bekerja, baik dari aspek fisik (infrastruktur kota, penataruangan kota) maupun non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi). Indeks Kota Layak Huni awalnya digunakan oleh Kota Sukabumi sebagai salah satu indikator tujuan. Tetapi indikator tersebut kemudian diganti menjadi Indeks Kenyamanan semenjak perubahan RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023 di tahun 2021.

Gambar 2.36



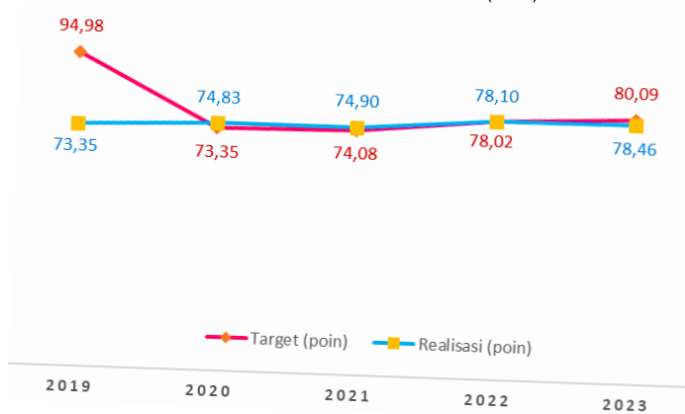
Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Capaian Indeks Kenyamanan Kota Sukabumi saat ini tergolong kategori Nyaman yaitu < 29 , untuk itu masih dapat ditingkatkan lagi mengingat pembangunan pasca Covid-19 sangat gencar dilakukan. Terlebih, adanya akses tol yang akan menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota hub, tuntutan akan kenyamanan kota akan semakin meningkat lagi. Karena itu, sangat diperlukan penataan kota, fasilitas rekreasi, pejalan kaki, olahraga, taman kota, seni budaya dan kelompok rentan.

2.3.4.4 Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan landasan penting bagi masyarakat terkait dengan etika dan moral. Idealnya semakin etika dan moral masyarakat membaik kerukunan umat beragama juga turut membaik. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diukur dengan Indeks KUB telah menjadi salah satu indikator capaian pembangunan di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.37 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Sukabumi cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman serta mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama.

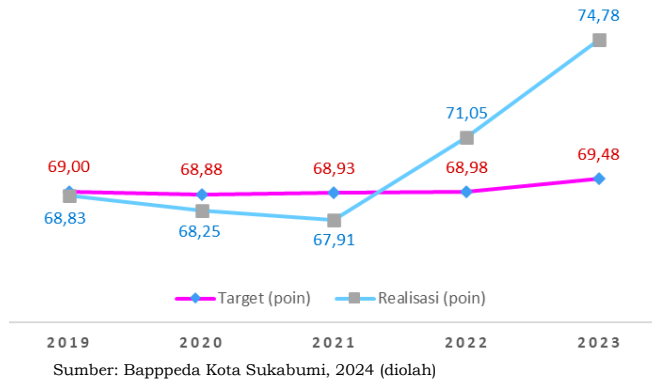
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Reformasi Birokrasi

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Memacu reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dengan birokrasi yang efisien melayani akan menumbuhkan iklim investasi agar ekonomi tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Gambar 2.38 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)

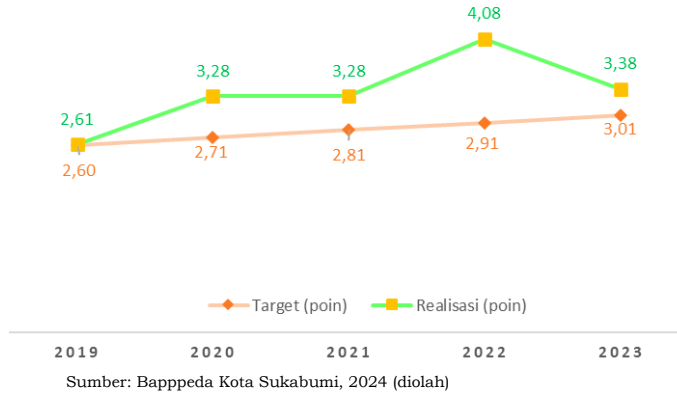


Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2019-2021 masih berada di rentang >60-70. Artinya reformasi birokrasi yang telah dilakukan masuk dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sukabumi naik dan masuk dalam kategori “Baik”. Artinya secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

2.4.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik di era sekarang ini dan ke depannya akan semakin kompleks. Kecepatan dan kemudahan pelayanan menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Gambar 2.39 Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)

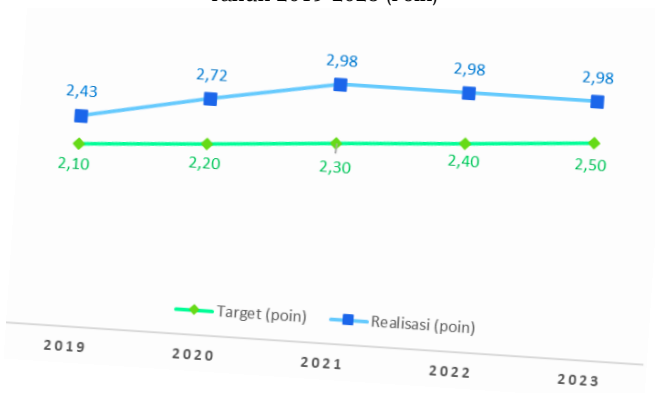


Indeks Pelayanan Publik Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Namun demikian, upaya peningkatan standar pelayanan publik agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Standar pelayanan tersebut mencakup kecepatan, kemudahan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Gambar 2.40 Indeks SPBE Kota Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024 (diolah)

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mendapatkan Nilai Indeks SPBE Tahun 2021-2023 sebesar 2,98 dengan Predikat Baik. Hasil ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan raihan Nilai Indeks SPBE Tahun 2019 dengan nilai sebesar 2,48 dengan Predikat Cukup dan Tahun 2020 dengan raihan Nilai Indeks SPBE sebesar 2,72 dengan Predikat Baik. Dengan demikian implementasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama dan kolaborasi yang baik antar OPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

2.4.4 Inovasi Daerah

Inovasi merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah untuk menghadapi persaingan baik di tingkat regional, nasional, bahkan global. Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing atau disebut dengan *innovation-driven development*. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin.

Tabel 2.8 Indeks Inovasi Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Target (persen/predikat)	60	550	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)	Terinovatif (≥ 1001)
Capaian (persen/predikat)	52	4675	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Dalam hal inovasi, Kota Sukabumi masuk dalam kategori sangat inovatif. Pertumbuhan aspek ekosistem inovasi didukung oleh pertumbuhan pilar dinamika bisnis serta pertumbuhan pilar kapasitas inovasi. Meskipun kondisi pilar kesiapan teknologi tidak bertumbuh, namun pertumbuhan pilar bisnis yang signifikan terutama didukung dengan adanya perbaikan pada dimensi kebijakan serta peningkatan dimensi kewirausahaan. Sementara pertumbuhan pilar kapasitas inovasi sangat dipengaruhi oleh dimensi interaksi dan keberagaman dan peningkatan dimensi penelitian dan pengembangan.

2.4.5 Merit Sistem

Merit sistem adalah sebuah kebijakan dan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Artinya, dalam penerapan merit sistem, seseorang akan menempati suatu jabatan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki, bukan karena faktor-faktor lain seperti hubungan keluarga, politik, atau suap.

Merit sistem di Kota Sukabumi mulai dilakukan penilaian sejak tahun 2022. Nilai Sistem Merit pada tahun tersebut yaitu 262,5, meningkat menjadi 291 di tahun 2023. Sementara Indeks Sistem Merit juga mengalami peningkatan dari 0,62 di tahun 2022 menjadi 0,71 di tahun 2023. Pada periode tahun 2022-2023 tersebut, Nilai Sistem Merit dan Indeks Sistem Merit masuk dalam kategori baik. Artinya, proses rekrutmen yang transparan dan adil, penilaian kinerja yang objektif, pengembangan kompetensi pegawai yang berkelanjutan, sistem promosi yang adil, dan adanya perlindungan terhadap pegawai.

2.4.6 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria

yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019-2023 adalah WTP dan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu opini WTP sehingga tingkat capaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Sukabumi adalah 100%. Opini WTP ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Visi Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa”. Visi tersebut mengandung konsekuensi bahwa Kota Sukabumi harus dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

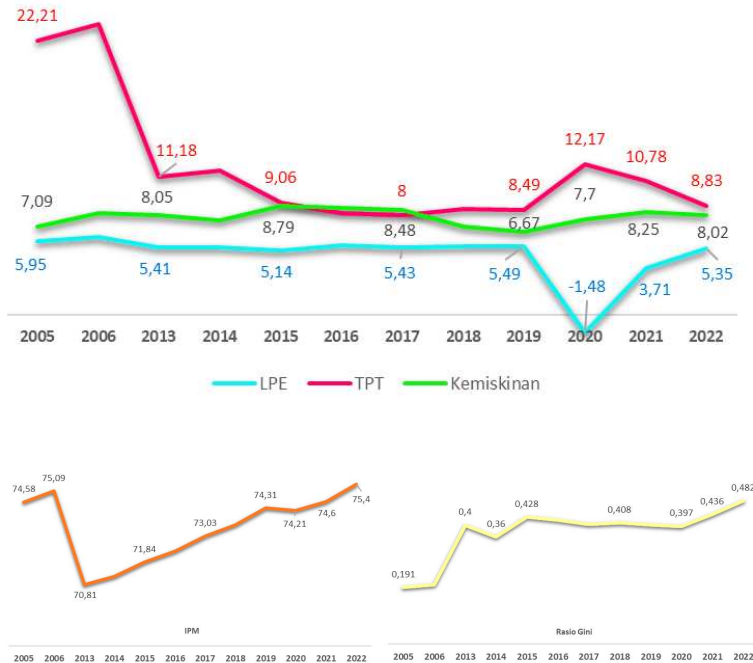
Pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi pada periode itu menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja RPJPD Kota Sukabumi dari tahun 2005 hingga tahun 2022 mencapai angka 97,82 persen dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Sukabumi sudah sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD.

Adapun arah kebijakan per periode pelaksanaan RPJPD yang dijabarkan dalam RPJMD juga sudah menunjukkan kekonsistenan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian pada periode 2008-2013 sebesar 100 persen, periode 2013-2018 sebesar 94,08 persen, dan periode 2018-2023 (capaian hingga tahun 2022) sebesar 99,74 persen.

Sementara itu, capaian indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren yang membaik terutama pada komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dan Pendapatan per Kapita. Capaian ini tidak lepas dari ketepatan dalam penentuan kebijakan,

rencana, dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sukabumi dan tentunya adanya kontribusi dari berbagai pihak.

Gambar 2.41 Capaian Kinerja Makro Kota Sukabumi Tahun 2005-2022



Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, 2023 (diolah)

Beberapa capaian indikator makro yang belum meningkat signifikan seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Angka Kemiskinan, dan Gini Rasio tidak serta merta bahwa kebijakan, rencana, dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sukabumi belum tepat. Namun pencapaian target indikator-indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai hal bahkan di luar kendali dari Pemerintah Kota Sukabumi. Misalnya kejadian Covid-19 yang tidak diperkirakan sebelumnya tetapi berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

2.6.1 Tren Demografi

Paradigma pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

2.6.1.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dengan berbagai fasilitas pendukungnya, Kota Sukabumi tentunya menjadi salah satu destinasi untuk dikunjungi/ditinggali. Keterbatasan wilayah tentunya menjadi salah satu hal yang harus dicermati seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat membawa konsekuensi serius terhadap perkembangan kota. Konsekuensi tersebut misalnya terkait dengan pemenuhan layanan dasar perkotaan, meningkatnya kemacetan, degradasi lingkungan, dan lainnya.

Gambar 2.42 Tren Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Jiwa)



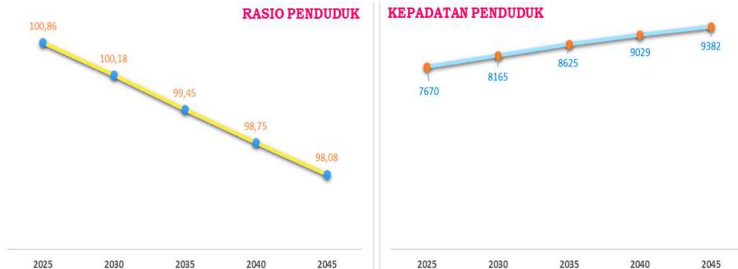
Sumber: Proyeksi BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Mencermati tantangan dinamika kependudukan yang berkembang, penduduk Kota Sukabumi diproyeksikan akan berjumlah 453.436 jiwa pada tahun 2045. Jumlah tersebut bertambah sebesar 88.524 jiwa (24,26 persen) jika dibanding tahun 2023 yang sebesar 364.912 jiwa.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Kota Sukabumi hingga tahun 2030 masih lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kondisi tersebut kemudian berbalik mulai tahun 2035, dimana jumlah penduduk perempuan akan semakin lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kecenderungan tersebut dapat disebabkan karena migrasi penduduk perempuan ke Kota Sukabumi semakin bertambah sementara penduduk laki-laki bermigrasi ke luar kota.

Dengan tren jumlah penduduk laki-laki yang semakin berkurang sementara penduduk perempuan semakin bertambah, menandakan bahwa peran perempuan akan semakin penting dalam pembangunan Kota Sukabumi ke depannya. Karena itu, perspektif gender menjadi relevan untuk dikedepankan dalam pengambilan kebijakan.

Gambar 2.43 Tren Rasio (Poin) dan Kepadatan (Jiwa/Km²) Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

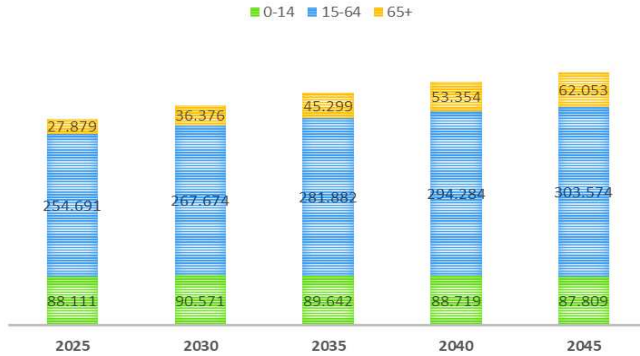
Jumlah penduduk Kota Sukabumi yang semakin bertambah, sementara luas wilayahnya tetap menyebabkan tingkat kepadatan penduduk juga semakin meningkat. Kondisi demikian perlu diantisipasi terutama untuk mendistribusikan penduduk ke wilayah-wilayah yang relatif belum padat sehingga penduduk dapat terdistribusi merata. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di wilayah yang belum berkembang sehingga dapat menarik penduduk ke wilayah tersebut.

2.6.1.2 Bonus Demografi

Tren jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Sukabumi sejalan dengan kecenderungan umum bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk nonproduktif (65

tahun ke atas) di Kota Sukabumi cenderung meningkat. Sementara itu, penduduk nonproduktif (0-14 tahun) cenderung menurun.

Gambar 2.44 Tren Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Jiwa)

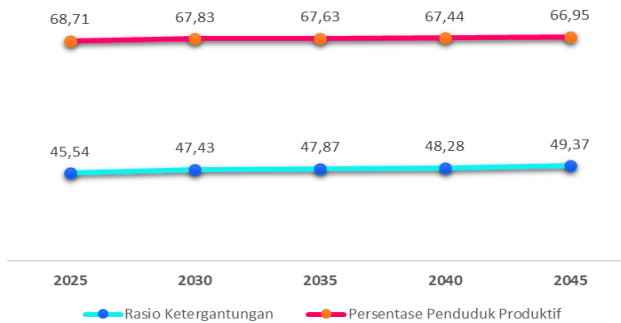


Sumber: Proyeksi BPS Kota Sukabumi, 2023 (diolah)

Proporsi penduduk produktif dibandingkan penduduk nonproduktif di Kota Sukabumi cenderung menurun tetapi masih berada diangka 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih berada di periode bonus demografi hingga tahun 2045. Kondisi demikian perlu menjadi perhatian mengingat Kota Sukabumi tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga potensi bonus demografi perlu dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian.

Optimalisasi potensi bonus demografi untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas tentu saja tidak mudah. Pemerintah Kota Sukabumi perlu memaksimalkan penerapan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Selain itu, *link and match* antara sistem pendidikan dan dunia kerja juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum mampu merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja juga perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

Gambar 2.45 Tren Bonus Demografi dan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Persen)



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Perkembangan bonus demografi di Kota Sukabumi cenderung menurun dan diikuti dengan perkembangan rasio ketergantungan yang semakin naik. Kondisi demikian dapat berdampak pada pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah sehingga dapat mengalami hambatan untuk lebih maju.

Beban ketergantungan yang meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk usia lanjut menuntut perlunya penyediaan layanan sosial untuk penduduk usia itu. Selain itu, pergeseran penyakit yang mengarah pada peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular juga berimplikasi pada perlunya penyediaan layanan kesehatan yang lebih modern.

2.6.1.3 Perilaku Penduduk

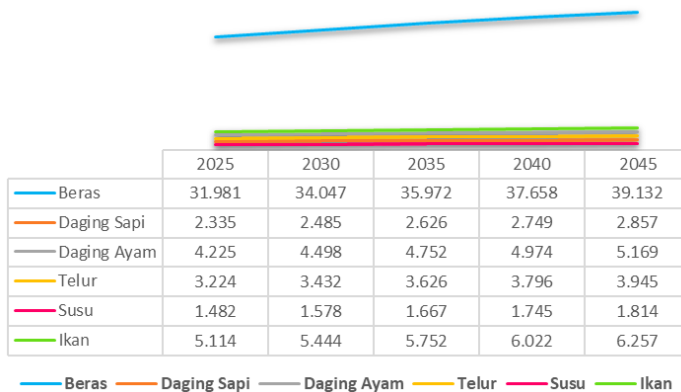
Penduduk Kota Sukabumi ke depannya akan didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Ketiga generasi ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Secara umum, ketiga generasi ini sangat melek dengan teknologi digital dan cepat beradaptasi dengan perkembangan baru. Generasi ini sangat ambisius, memiliki jiwa wirausaha alami, dan lebih memilih memulai bisnis mereka sendiri dan mempekerjakan orang. Generasi ini juga dikenal dengan kemampuan *multitasking*-nya. Sayangnya, generasi ini sangat bergantung pada teknologi untuk menyelesaikan masalah.

Generasi yang beragam dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, sadar dan paham teknologi merupakan keunggulan tersendiri yang perlu dioptimalkan. Namun, generasi ini rentan mengalami isu kesehatan mental. Selain itu, kesadaran akan pentingnya budaya dan etika menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membekali generasi tersebut dengan pendidikan agama, karakter dan budaya.

2.7 TREN KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT

Jumlah penduduk Kota Sukabumi tahun 2045 diperkirakan sekitar 430 ribu jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk ini tentunya berimplikasi pada konsumsi pangan masyarakat yang juga semakin meningkat. Konsumsi pangan di Kota Sukabumi selain beras yang relatif besar yaitu ikan, daging ayam, dan telur. Kondisi demikian perlu untuk diantisipasi agar Pemerintah Kota Sukabumi dapat meningkatkan ketahanan pangan mengingat perubahan iklim yang terjadi dapat mengancam produksi pangan.

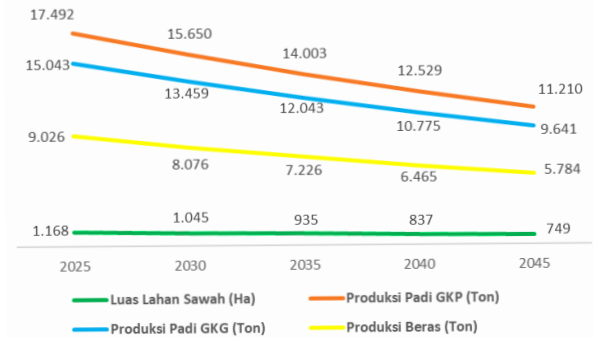
Gambar 2.46 Tren Konsumsi Pangan Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

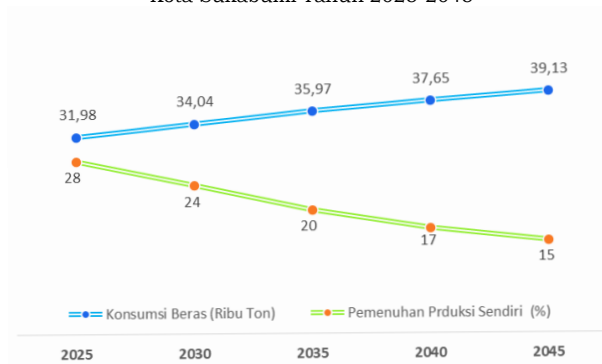
Khusus untuk beras, kebutuhan konsumsi yang makin meningkat berbanding terbalik dengan produksi padi yang dihasilkan Kota Sukabumi. Hal ini dikarenakan tekanan pembangunan menyebabkan luas lahan pertanian (padi) menjadi berkurang. Kondisi demikian perlu menjadi perhatian terutama untuk mulai melakukan intensifikasi lahan pertanian sehingga produksi padi dapat dijaga.

Gambar 2.47 Tren Produksi Padi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Gambar 2.48 Tren Pemenuhan Sendiri Konsumsi Beras Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

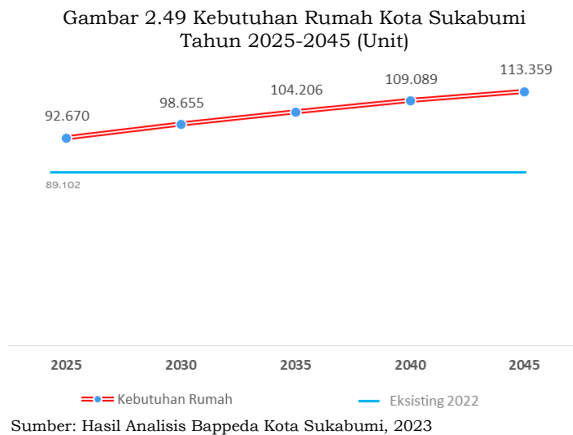
Jika dicermati lebih dalam, peningkatan konsumsi beras tidak dibarengi dengan peningkatan pemenuhan produksi sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan beras akan sangat bergantung pasokan dari luar Kota Sukabumi.

2.8 KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi, pemenuhan sarana prasarana dasar pelayanan publik tentunya juga akan makin bertambah. Walaupun dinamika ke depannya, dengan kemajuan teknologi informasi, perubahan pelayanan publik mungkin akan lebih efisien namun jumlah ideal sarana prasarana yang harus tersedia mengikuti pertambahan jumlah penduduk perlu untuk diperhitungkan. Hal ini penting agar semua kelompok masyarakat dapat mendapatkan akses terhadap sarana prasarana dasar yang pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap produktivitas masyarakat.

2.8.1 Rumah/Tempat Tinggal

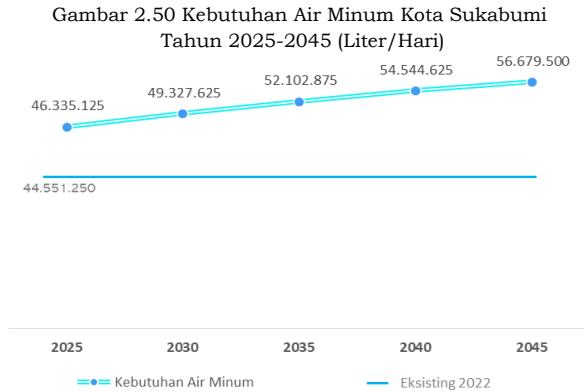
Kebutuhan rumah di Kota Sukabumi menunjukkan tren meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan kota. Kesenjangan ketersediaan eksisting dengan kebutuhan rumah sekitar 3.500 unit di tahun 2025 dan akan meningkat terus hingga tahun 2045.



Berdasarkan RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042, peruntukan kawasan permukiman dialokasikan seluas kurang lebih 2.761 hektar terdiri atas kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan ruang terbuka non hijau. Dengan kondisi wilayah yang terbatas dan rawan terhadap bencana maka penyediaan rumah dengan konsep vertikal dan tahan terhadap bencana perlu menjadi pertimbangan untuk ke depannya.

2.8.2 Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu dan harus disediakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi itu, terdapat ancaman yang mengiringinya yaitu krisis air. Ancaman krisis ini terkait dengan tren perubahan iklim yang mempengaruhi cadangan ketersediaan air sementara kebutuhan air cenderung meningkat.



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

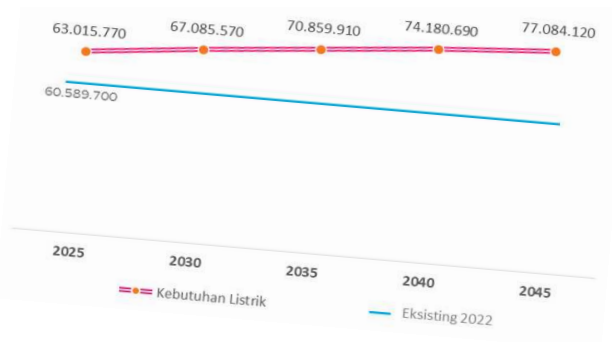
Kebutuhan air di Kota Sukabumi tahun 2045 diperkirakan mencapai 56.679.500 liter/hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diarahkan dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan meliputi unit produksi (Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cimandiri Kecamatan Baros dan Unit Produksi *Water Treatment Plant* Cipelang Kecamatan Gunungpuyuh), unit distribusi tersebar di seluruh kecamatan termasuk saluran hidran kebakaran, dan unit pelayanan, berupa unit pelayanan yang terdapat di Kecamatan Cikole. Bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur pompa yang tersebar di seluruh kecamatan, bak penampungan air hujan di seluruh kecamatan dan terminal air di Kecamatan Cikole.

2.8.3 Listrik

Peningkatan kebutuhan energi listrik di Kota Sukabumi tidak dapat dielakkan ke depannya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi penduduk yang terus meningkat, maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya. Kebutuhan energi listrik di Kota

Sukabumi tahun 2045 diperkirakan mencapai 77.084.120 KVA. Sementara itu, pasokan listrik saat ini sebesar 60.589.700 KVA.

Gambar 2.51 Kebutuhan Listrik Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (kVA)



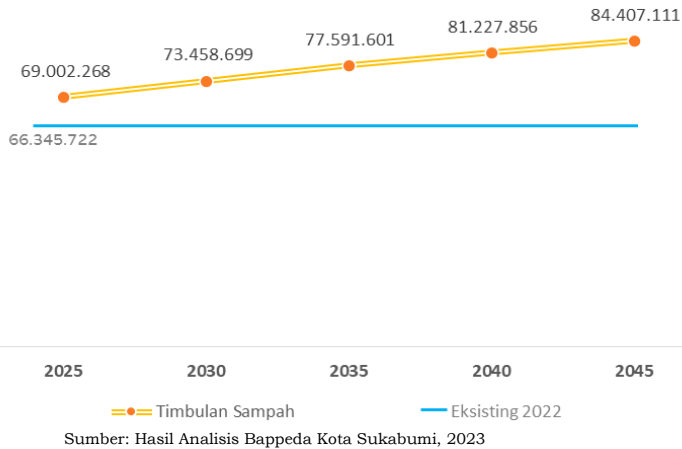
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Sukabumi yang makin meningkat diperlukan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung direncanakan terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu dan di Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh.

2.8.4 Persampahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Sukabumi, maka timbulan sampah akan terus bertambah. Jika dihitung, per orang memiliki kecenderungan menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Sehingga jika diproyeksikan, maka pada tahun 2045 ketika penduduk Kota Sukabumi mencapai angka 453.436 jiwa maka jumlah sampah yang diproduksi diperkirakan mencapai 84.407.111 liter per hari. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 66.345.722 liter per hari. Dengan demikian, guna membantu penanganan sampah di Kota Sukabumi maka diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang persampahan. Mulai dari sarana untuk mengangkut sampah hingga menyimpan sampah serta mengolah sampah.

Gambar 2.52 Timbunan Sampah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Liter/Hari)

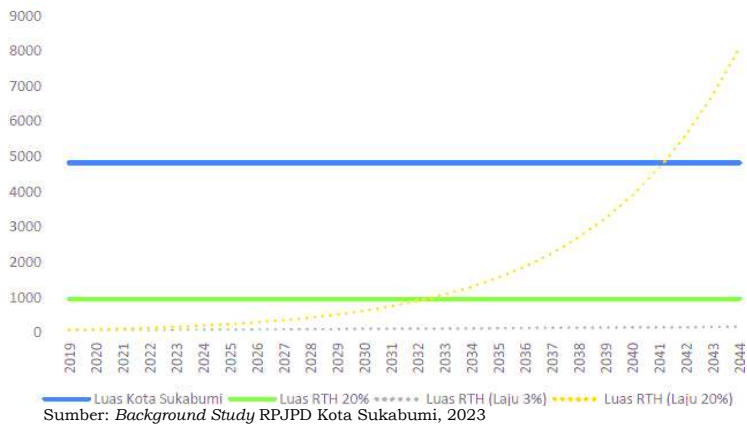


Jika mengacu pada pola *business as usual*, yakni dengan mengangkut mayoritas sampah ke TPA, maka persoalan selanjutnya akan muncul. Setidaknya ada sekitar 83 persen timbunan sampah yang dikirimkan ke TPA. Sisanya diolah secara mandiri di rumah, diolah secara komunitas, serta dilakukan 3R. Oleh karena itu, sistem jaringan persampahan Kota Sukabumi direncanakan terdiri atas stasiun peralihan antara di Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* yang tersebar di seluruh kecamatan, tempat penampungan sementara yang tersebar di seluruh kecamatan dan tempat pemrosesan akhir di Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu.

2.8.5 Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, menetapkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri RTH Publik dan RTH Privat. RTH publik dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk masyarakat, sedangkan RTH privat pengelolaan serta pemanfaatannya hanya untuk kepentingan perseorangan atau kalangan tertentu. Persentase RTH yang harus dipenuhi oleh setiap daerah yaitu sekurang kurangnya 30% dari luas wilayah, dengan rincian 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Gambar 2.53 Kebutuhan RTH Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Jika dicermati gambar di atas, RTH Publik di Kota Sukabumi masih jauh dari ideal karena luasnya masih sekitar 8,5 persen. Alokasi RTH Kota Sukabumi berdasarkan RTRW seluas kurang lebih 412 hektar terdiri atas rimba kota, taman kota dan pemakaman. Untuk mencapai luasan yang ideal, dengan intervensi pendekatan *business as usual* maka hingga tahun 2045 kebutuhan RTH Kota Sukabumi belum terpenuhi. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan progresif agar kebutuhan RTH Kota Sukabumi dapat terpenuhi. Pendekatan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Kota Sukabumi saja tetapi melibatkan masyarakat dan swasta. Untuk mendorong partisipasi masyarakat perlu diawali dengan sosialisasi akan pentingnya RTH dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pemenuhan RTH.

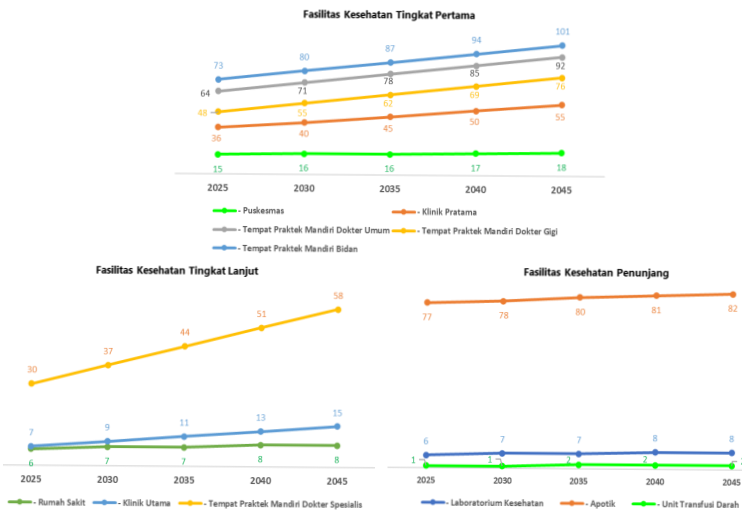
2.8.6 Kesehatan

Di Kota Sukabumi sudah terdapat berbagai pelayanan kesehatan primer yang merupakan pelayanan kesehatan terdekat dari masyarakat dan menjadi tonggak utama di bidang kesehatan masyarakat. Pelayanan ini meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu fasilitas kesehatan yang melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program yang

dilaksanakan melalui pendekatan keluarga. Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga mempunyai jejaring yaitu dokter, bidan, perawat, klinik praktek swasta, apotek jejaring, laboratorium jejaring, atau fasilitas kesehatan penunjang lainnya. Laporan dari jejaring ini menjadi salah satu tolok ukur pelayanan dan capaian kinerja kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Jumlah puskesmas di Kota Sukabumi tahun 2022 sebanyak 15 puskesmas dengan jarak tempuh terjauh masyarakat menuju sarana pelayanan kesehatan \pm 3 km, sehingga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu di Kota Sukabumi juga sudah terdapat rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jumlah rumah sakit di Kota Sukabumi pada tahun 2022 sebanyak 6 Rumah Sakit dengan status milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 rumah sakit, swasta 3 rumah sakit dan 1 rumah sakit milik Polri.

Gambar 2.54 Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan proyeksi, ketersediaan sarana kesehatan untuk melayani jumlah penduduk Kota Sukabumi tahun 2045 sebesar 453.436 jiwa relatif sudah mencukupi untuk beberapa fasilitas seperti Puskesmas, Rumah Sakit,

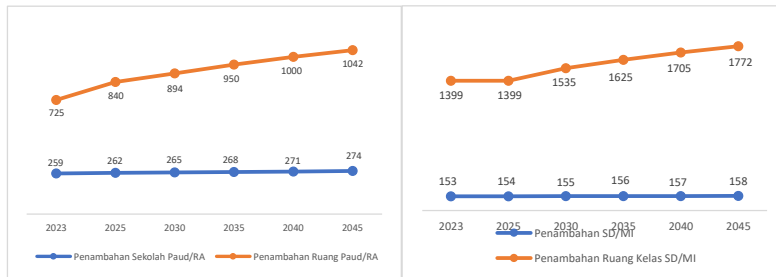
Klinik Utama dan fasilitas kesehatan penunjang. Namun untuk fasilitas tempat praktek masih memerlukan penambahan yang relatif banyak. Meskipun demikian, upaya utama yang diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan penduduk Kota Sukabumi yaitu dengan meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan serta peningkatan kualitas layanan.

2.8.7 Pendidikan

Kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan merata masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan mengingat jumlah penduduk Kota Sukabumi semakin bertambah ke depannya.

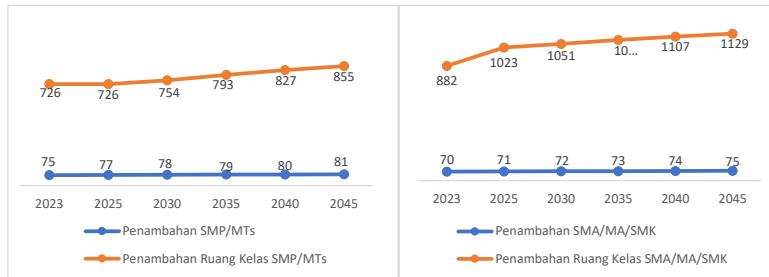
Kebutuhan sarana pendidikan yang harus di perhatikan adalah jumlah sekolahnya dari mulai tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan yang paling penting juga adalah kebutuhan penambahan ruang belajar atau kelas. Penambahan jumlah sekolah diutamakan pada wilayah yang memang masih sangat terbatas jumlahnya serta di wilayah yang sama sekali belum tersedia, sedangkan penambahan kelas di prioritaskan pada sekolah-sekolah tertentu yang sudah mengalami *overload* jumlah peserta didik. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.55 Kebutuhan Sarana PAUD dan SD/MI (Kelas) Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Gambar 2.56 Kebutuhan Sarana SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Dari semua jenjang pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan di Kota Sukabumi hingga tahun 2045 masih memerlukan penambahan, terutama pada kebutuhan penambahan ruang kelas yang masih mengalami banyak kekurangan. Hal ini perlu diantisipasi meskipun kemajuan teknologi informasi dan perkembangan sistem belajar mengajar akan berpengaruh terhadap perlu atau tidaknya penambahan sarana pendidikan tersebut.

2.9 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.9.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kota Sukabumi

RTRW Kota Sukabumi 2022-2042 bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, terdapat rencana pengembangan pusat pertumbuhan untuk melayani dan mendukung pengembangan Kota Sukabumi.

Pusat Pelayanan Kota Sukabumi yang dibuat atas penentuan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kota) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan), meliputi:

- a. PPK: Cikole dan Cibereum dimana Cikole merupakan pusat pelayanan ekonomi dan kesehatan sedangkan Cibereum merupakan pusat pelayanan sosial, atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota;

Tabel 2.9 Indikasi Program Prioritas Kota Sukabumi

NO.	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM
1	Pembangunan Jalan Tol Bocimi	
2	Sarana dan prasarana transportasi : a. Pembangunan Gedung Parkir b. Angkutan Umum Masal	Pembangunan gedung parkir dipusat kota a. Rute dan Trayek SAUM b. SAUM Untuk Wisata
3	Kawasan Pusat Pemerintahan	Pusat Pemerintahan Baru di Cibeureum
4	Penanganan Persampahan	a. Pembangunan RDF Sampah b. Pembangunan TPST di 7 Kecamatan
5	Transportasi Kereta Api	a. Revitalisasi jalur kereta api (Sukabumi-Cianjur – Bandung) b. Pembangunan jalur ganda kereta api (Sukabumi-Bogor dan Sukabumi – Cianjur) c. Rintisan Pembangunan Stasiun Kereta Api Baru di Kecamatan Cibeureum) dan Penataan Stasiun Sukabumi
6	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan	a. Water Treatment Plant (WTP) Gunungpuyuh b. WTP Sungai Cimandiri
7	Pengembangan Kawasan Pariwisata	a. Kawasan Agroeduwisata Cikundul b. Kawasan wisata Air Panas Cikundul c. kawasan pariwisata Sungai Cimandiri/ Cipelang
8	Penataan dan Penanganan Kawasan Permukiman	a. Penuntasan kawasan kumuh b. Peningkatan rehabilitasi Rutilahu c. Penyediaan fasilitas hunian bagi backlog MBR
9	Penataan kawasan dan bangunan bersejarah	a. Kawasan Jl. Kaswari – Jl. Kenari dan Jl. Bhayangkara b. Kawasan perdagangan Ahmad Yani c. Kawasan Jl. Stasiun – Jl. Otista d. Kawasan Alun – Alun, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Veteran e. Kawasan Pendopo Kabupaten f. Kawasan Jl. Siliwangi g. Kawasan Museum Pegadaian h. Kawasan Jl. Odeon – Jl. Pajagalan i. Kawasan Jl. Suryakencana j. Kawasan Jl. R. Syamsudin S.H – Ir. H. Juanda – Jl. R.E Martadinata k. Kawasan BBAT l. Kawasan Kota Paris
10	Terminal	a. Optimalisasi terminal type A KH. Ahmad Sanusi b. Pengembangan terminal type C Lembursitu
11	Energi dan Telekomunikasi	a. Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya berupa solar cell dan microhydro b. Pengembangan jaringan telepon sistem kabel berupa serat optic
12	Sumber Daya Air	Pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih dengan mendayagunakan embung
13	Sistem pengolahan limbah	Pengembangan pengelolaan Air limbah Domestik sistem terpusat
14	Sistem jaringan pejalan kaki	Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya
15	Sistem proteksi kebakaran	a. Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di kawasan permukiman

NO.	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM
		b. Revitalisasi hydran kota
16	RTH	Pembebasan lahan untuk membangun RTH Publik untuk mencapai target luasan 20% dari luas kota
17	Fasilitas Umum dan Sosial	a. Revitalisasi lapangan olahraga yang sudah ada b. Peningkatan fungsi GOR dan stadion Suryakencana

Sumber: RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042

Secara rinci dan detail, indikasi program prioritas berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 terdapat dalam lampiran 1 dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 ini.

2.9.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042, Kota Sukabumi masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi dsk dengan tema pengembangan yaitu mendorong perkembangan koridor Sukabumi, Cianjur, dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Adapun Kota Sukabumi difokuskan pada pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sukabumi.

Gambar 2.58 Tema WP di Provinsi Jawa Barat



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Pengembangan WP Sukabumi dan sekitarnya merupakan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, dengan fokus untuk mendorong koridor Sukabumi – Cianjur dan PKW Pelabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki, kerentanan terhadap risiko bencana alam, gangguan hulu DAS, menghindari alih fungsi kawasan lindung dan lahan pertanian sawah produktif. WP ini terdiri atas Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera serta mengembangkan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diarahkan pada upaya melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL; mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif; dan mengembangkan sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan.

Percepatan pembangunan berbasis hijau dan sirkular diarahkan pada upaya meningkatkan kondisi lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan serta mengembangkan mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengembangan infrastruktur pendukung diarahkan pada upaya membangun infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata dalam mendukung kegiatan pariwisata dan adaptif terhadap bencana; membangun infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur digital.

Pembangunan perekonomian diarahkan pada upaya menciptakan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja; meningkatkan kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan); mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan; mengembangkan kawasan pariwisata terintegrasi; mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk dan jasa

sektor-sektor perekonomian; mengembangkan UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung fungsi PKW Sukabumi, indikasi program RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 yang akan dilaksanakan dan/atau dapat mempengaruhi perkembangan kota, antara lain:

1. Pengembangan pusat distribusi provinsi;
2. Pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
3. Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional;
4. Pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi;
5. Pengembangan simpang susun tidak sebidang di tiga lokasi Kota Sukabumi;
6. Pengembangan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi seksi 4;
7. Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang; dan
8. *Double Track* Jawa Selatan.

2.9.3 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045

Berdasarkan RPJPN 2025-2045, tema pembangunan Pulau Jawa diarahkan menjadi wilayah “Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.” Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang bersifat makro untuk konteks Pulau Jawa.

Gambar 2.59 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Dari arah kebijakan makro tersebut, terdapat beberapa arahan yang relevan dengan konteks Kota Sukabumi, antara lain:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
2. Perkuatan tenaga medis dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan;
3. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis teknologi informasi;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat;
8. Pengembangan agroindustri;
9. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata;
10. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil;
11. Pengembangan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan;
12. Penguatan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi;
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan;
14. Percepatan digitalisasi layanan publik;
15. Mendorong inovasi dan penelitian;
16. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
17. Peningkatan keamanan untuk mengurangi kriminalisasi;
18. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
19. Revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat;
20. Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan;
21. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
22. Diversifikasi produk pangan;
23. Peningkatan ketersediaan air;
24. Mengurangi alih fungsi lahan;
25. Penguatan kemandirian dan ketahanan pangan;
26. Mengurangi emisi gas rumah kaca;
27. Pengelolaan risiko bencana;
28. Penguatan kerja sama antardaerah;
29. Pengurangan ketimpangan wilayah;
30. Pemenuhan rumah layak huni;
31. Peremajaan kota;
32. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman; dan
33. Pengelolaan persampahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan Kota Sukabumi akan disajikan sesuai dengan 4 (empat) aspek pembangunan yang masing-masingnya akan diuraikan seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Permasalahan Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1.1 Geografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. alih fungsi lahan yang masif untuk permukiman yang ditunjukkan luas lahan pertanian pada tahun 2022 sekitar 1.371 hektare menjadi 1.221 hektare di tahun 2023;
- b. minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang baru mencapai 8,5 persen dari yang seharusnya 20 persen di tahun 2023;
- c. sistem pangan yang belum optimal mengingat kebutuhan yang makin meningkat tetapi produksi seperti beras menurun sekitar 40 persen di tahun 2045;
- d. nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 20.239,52 Ton Co₂eq di tahun 2022 dan 2023, hal tersebut harus diwaspadai karena akan mempengaruhi fenomena perubahan iklim; dan
- e. risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar mengingat Kota Sukabumi masuk dalam lintasan Sesar Cimandiri.

3.1.1.2 Demografi

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. distribusi penduduk yang belum merata yang ditunjukkan dengan konsentrasi jumlah penduduk di Kecamatan Cikole (63,24 ribu jiwa), Warudoyong (60,72 ribu jiwa), dan Citamiang (54,57 ribu jiwa);
- b. belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk bekerja didominasi lulusan SMP ke bawah yaitu sebanyak 71.712 jiwa;
- c. belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi, baik dari sektor publik maupun swasta; dan
- d. keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat yang relatif tinggi ditunjukkan dengan rasio gini yaitu 0,45 dan masih berada di atas angka Provinsi Jawa Barat serta nasional;

- b. pertumbuhan ekonomi cenderung melambat (5,12 persen) dan belum mencapai target (5,54 persen) meski capaiannya di atas angka Provinsi Jawa Barat;
- c. akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal yang tercermin dari angka kemiskinan yang masih berada di angka 7,5 persen;
- d. terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi yaitu berada di angka 8,53 persen di atas angka Provinsi Jawa Barat (7,44 persen) dan Nasional (5,32 persen); dan
- e. IPM untuk skala kota masih cukup rendah dibanding kota lain di Jawa Barat karena hanya lebih baik dari Kota Tasikmalaya (75,47) dan Kota Banjar (74,45).

3.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. belum merata dan tercukupinya SDM kesehatan yang komposisinya masih didominasi perawat (47 persen), bidan (12 persen), dan dokter (7 persen);
- b. Umur Harapan Hidup Kota Sukabumi (74,89) masih di bawah kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat dan hanya lebih baik dari Kota Banjar (74,77);
- c. ruang-ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan masih terbatas meskipun angka partisipasinya sudah mencapai 25,40 persen; dan
- d. rendahnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga yang ditunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang berada di angka 45 persen, sementara TPAK laki-laki mencapai 79 persen;

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. masih rendahnya kontribusi PDRB ADHB Kota Sukabumi terhadap Provinsi Jawa Barat yang hanya 0,58 persen;
- b. PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat yaitu Rp 42.562 ribu;

- c. belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dalam perekonomian kota;
- d. kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan dikarenakan perkembangan kota yang memang timpang dan lebih maju di wilayah utara;
- e. belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar;
- f. realisasi investasi yang cenderung meningkat tidak serta menurunkan angka pengangguran secara signifikan, dimana TPT Kota Sukabumi masih berada di angka 8,53 persen;

3.1.3.2 Daya Saing SDM

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. kemampuan numerasi siswa yang masih dalam kategori sedang (berkisar di angka 55 persen);
- b. budaya literasi masyarakat mengalami penurunan ditunjukkan dengan IPLM tahun 2023 yang menurun signifikan;
- c. belum optimalnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan SDM kreatif;
- d. ekosistem digital belum terbangun dengan baik meskipun skor adopsi TIK Kota Sukabumi sudah mencapai 4,76;
- e. kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan yang cukup besar dimana TPAK laki-laki 79,75 persen, sementara TPAK perempuan hanya 44,91 persen;
- f. rasio ketergantungan yang stabil berada di angka 45 menunjukkan perlunya memanfaatkan bonus demografi untuk lebih meningkatkan produktivitas masyarakat.

3.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain:

- a. konektivitas antar wilayah agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang selama ini lebih berorientasi di wilayah utara; dan

- c. belum optimalnya penyediaan air minum (kebutuhan eksisting 44.551.250 liter/hari), pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan (produksi sampah mencapai 66.345.722 liter per hari).

3.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi UMKM;
- b. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban meskipun Indeks Rasa Aman Kota Sukabumi sudah mencapai 76,33;
- c. masih adanya pelanggaran Perda dan unjuk rasa yang dilakukan; dan
- d. konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi terutama berkaitan dengan perkelahian antar kelompok pelajar dan pemuda.

3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pelayanan umum di Kota Sukabumi, antara lain:

- a. penerapan Reformasi Birokrasi masih bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi (nilai Indeks RB berada di angka 74,78); dan
- b. perlunya peningkatan pelayanan publik karena Indeks Pelayanan Publik mengalami penurunan dan berada di angka 3,38;

3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

Penyelenggaraan pembangunan Kota Sukabumi untuk dua puluh tahun ke depan tentu tidaklah mudah. Akan banyak hambatan, permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi yang tentunya harus diatasi dan diselesaikan bersama. Tantangan tersebut muncul berdasarkan hasil analisis dan prediksi dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal terutama berkaitan dengan kondisi terkini Kota Sukabumi dengan estimasi kondisi yang akan datang serta sisi eksternal terutama dengan adanya kebijakan di wilayah sekitar, provinsi ataupun nasional.

Gambar 3.2 Tantangan Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Perekonomian dan ketimpangan merupakan salah satu tantangan yang masih dialami Kota Sukabumi. Perekonomian Kota Sukabumi saat ini bertumbuh dengan baik, yang ditandai dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian masih banyak potensi lain yang belum digali dengan baik seperti bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif serta pariwisata di Kota Sukabumi. Selain itu yang harus juga menjadi perhatian utama adalah masih terjadinya ketimpangan yang cukup tinggi antara si kaya dan si miskin serta belum meratanya pembangunan di wilayah utara dan selatan. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membuat pusat-pusat ekonomi dan pertumbuhan baru yang tidak hanya berlokasi di wilayah utara tapi juga di wilayah selatan. Meneruskan rencana pembangunan pusat pemerintahan ke wilayah Kecamatan Cibeureum salah satu alternatif yang bisa dilakukan, karena hal tersebut bisa menumbuhkan pusat ekonomi dan pertumbuhan baru sehingga bisa berdampak pada kondisi perekonomian terutama di wilayah selatan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis yang di sampaikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan ke depan Kota Sukabumi terkait ini adalah bagaimana menangani dampak pembangunan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan, bagaimana bisa mengelola sampah menjadi *Black Gold*, serta memastikan ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ke depan pembangunan yang

dilakukan selain harus bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini, juga memperhatikan prinsip tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi yang akan datang.

Kebijakan nasional, provinsi dan wilayah sekitar akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Kota Sukabumi. Pembangunan jalan tol sesi 3 dan 4, pembuatan jalur kereta api *double track*, pengembangan stasiun cisaat, pengaktifan kembali kereta api Sukabumi-Bandung oleh Pemerintah Pusat, serta rencana Tol Sukabumi-Cianjur-Bandung oleh Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu program yang harus disambut baik. Tetapi juga di harus diwaspadai bersama karena bisa jadi bumerang bagi Kota Sukabumi. Apabila Kota Sukabumi tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka ke depan hanya akan menjadi kota perlintasan semata sehingga bisa membuat lesunya pertumbuhan dan perekonomian. Kebijakan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Sukabumi juga akan mempengaruhi kondisi kota, rencana pembangunan pasar induk di perbatasan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi serta kebijakan lainnya tentu akan sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi kerakyatan yang selama ini sudah berkembang cukup baik. Karena itu, komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan wilayah sekitar, provinsi ataupun pusat sangat penting untuk terus dilakukan dan di tingkatkan kembali.

Bonus demografi bagaikan dua mata pisau, yang nantinya akan sangat mendukung proses pembangunan karena semakin banyaknya usia produktif yang ada, tapi di sisi lain apabila tidak dipersiapkan dengan baik maka bisa menjadi beban berat bagi pemerintah daerah. Penyediaan SDM berkualitas yang disertai lapangan kerja yang luas merupakan pekerjaan rumah bersama bagi semuanya. Selain itu semakin tingginya jumlah penduduk usia lanjut terutama perempuan juga harus menjadi perhatian karena mereka membutuhkan perhatian dan pelayanan yang lebih fokus dan khusus.

Sosial budaya juga harus senantiasa di perhatikan pada masa dua puluh tahun ke depan. Modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi akan berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperparah dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan. Sosial budaya merupakan pilar yang harus terus menjadi perhatian, kearifan sosial dan budaya lokal

harus terus dijaga dan dikembangkan sehingga bisa meminimalisir dan mencegah dampak negatif dari globalisasi.

Digitalisasi dan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan di era transformasi digital ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat serta digitalisasi sudah berada di semua sendi kehidupan. Kota Sukabumi harus senantiasa menyiapkan sumber daya yang handal dalam menunjang proses adaptasi dan implementasi teknologi informasi. Riset juga menjadi bagian yang tak kalah penting sebagai pondasi dalam mengambil keputusan.

Tata kelola pemerintahan harus selalu menjadi perhatian bagi pemerintah ataupun pemerintah daerah. Ke depan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, mudah, murah dan berbasis digital akan semakin tinggi. Masyarakat akan semakin kritis terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan tanpa henti dan mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam implementasinya.

3.3 ISU STRATEGIS SESUAI KONTEKS

3.3.1 Isu Global

Isu global yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap Kota Sukabumi diidentifikasi dari RPJPN 2025-2045 dan laporan/kajian resmi lainnya.



Gambar 3.3 Isu Global

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Demografi global akan mewarnai tatanan kehidupan di masa depan. Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat namun laju pertumbuhannya melambat membawa konsekuensi akan pentingnya ketahanan pangan, air, dan energi untuk memenuhi kebutuhan yang juga

makin meningkat. Di sisi lain, mobilitas penduduk dunia akan semakin mudah dan dunia seperti *borderless*. Dengan mobilitas yang makin tinggi, pertukaran ideologi, pengetahuan dan budaya yang dibawa orang-orang tak dapat dihindari. Selain itu, kecenderungan penduduk usia lanjut yang semakin bertambah akan mempengaruhi penyediaan layanan sosial pada kelompok usia tersebut. Hal itu tentu saja tidak hanya akan berpengaruh pada konteks Indonesia namun juga konteks Provinsi Jawa Barat dan tentu saja Kota Sukabumi.

Perkembangan geopolitik dan geoekonomi ke depan juga dapat berdampak pada tatanan kehidupan tidak hanya di tingkat global dan nasional, tetapi juga di tingkat regional dan tentu saja di Kota Sukabumi. Dinamika geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru akan membuka berbagai peluang. Kolaborasi menjadi penting untuk memanfaatkan peluang yang akan muncul tersebut. Geoekonomi yang akan bergeser ke Kawasan Asia tentunya juga membuka berbagai peluang untuk meningkatkan nilai output yang dihasilkan. Kota Sukabumi pun memiliki kesempatan besar untuk menangkap berbagai peluang yang muncul, mengingat konektivitas dengan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi semakin mudah.

Tak dapat dipungkiri jika disrupsi teknologi telah mempercepat tatanan kehidupan yang baru. Hal ini juga akan terus berlangsung dan pada akhirnya akan mengubah peran manusia secara signifikan. Disrupsi teknologi bahkan tidak mengenal batas-batas wilayah, baik di Indonesia ataupun di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi serta baik diperkotaan ataupun perdesaan mulai merasakan pengaruhnya. Tuntutan adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan. Tidak hanya di sektor swasta namun sektor publik pun juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan ke masyarakat yang cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut.

Persaingan sumber daya alam akan makin meningkat seiring dengan kebutuhan dunia yang juga meningkat. Indonesia yang dianugerahi berbagai potensi sumber daya alam tentunya akan menjadi incaran untuk memasok kebutuhan dunia tersebut. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu sumber pangan nasional. Melihat kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menurun sementara kebutuhan makin meningkat

diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan akan ketersediaan sumber daya alam tersebut.

Terjadinya krisis iklim yang sudah dirasakan diberbagai belahan dunia akan tetap berlangsung seiring dengan tuntutan kestabilan ekonomi. Krisis iklim tersebut juga sudah dirasakan oleh Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi yang diindikasikan dengan kejadian bencana yang makin meningkat dan kekeringan serta krisis air di sebagian wilayah. Fenomena krisis yang sudah terjadi memerlukan perubahan paradigma pembangunan dengan menempatkan lingkungan sebagai variabel yang penting dan setara dengan variabel ekonomi serta sosial.

3.3.2 Isu Nasional

Isu nasional yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap Kota Sukabumi diidentifikasi dari RPJPN 2025-2045 dan laporan/kajian resmi lainnya. Isu nasional tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4 Isu Nasional



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi Indonesia. IKN tidak saja dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN. Perpindahan IKN tersebut tentunya akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat yang selama ini berperan penting dalam mendukung

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat tentunya makin jauh jaraknya. Selain itu, Jakarta yang ditransformasikan menjadi kota global akan membawa nilai tambah ekonomi yang besar bagi daerah di sekitarnya tak terkecuali Kota Sukabumi.

Melihat potensi dan tren yang terjadi, pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi digital akan menjadi orientasi pembangunan baru ke depannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetap menjadi target pembangunan dan keselamatan lingkungan diharapkan sejalan dengan itu. Tren pembangunan tersebut tentunya akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat mengingat tekanan yang mengarah pada pembangunan ekonomi hijau cukup besar. Dalam konteks Kota Sukabumi, dengan karakteristik perkotaan yang kuat maka potensi yang mungkin untuk dikembangkan adalah ekonomi hijau dan ekonomi digital.

Bonus demografi akan makin berperan penting dalam pembangunan jika dipersiapkan dan dioptimalkan dengan tepat sejak dini. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar, Indonesia berpeluang mendapatkan keuntungan akan hal itu. Bonus demografi juga harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas masyarakatnya dan menjaga pola konsumsi berkelanjutan. Kondisi demikian juga berpengaruh pada Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi mengingat ke depannya akan didominasi penduduk usia produktif. Namun demikian, penduduk usia lanjut juga menunjukkan tren yang makin bertambah.

Konektivitas dan infrastruktur dasar selalu menjadi isu yang selalu muncul. Konektivitas antar pulau ataupun desa-kota yang disertai dengan infrastruktur dasar belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Dalam upaya mengejar berbagai transformasi, dukungan konektivitas dan infrastruktur dasar yang mantap mutlak diperlukan. Isu nasional ini juga mempengaruhi Provinsi Jawa Barat mengingat ketimpangan wilayah utara-selatan masih terlihat dengan konsentrasi pembangunan selama ini terpusat di koridor utara. Begitu juga dalam konteks Kota Sukabumi, pembangunan wilayah utara dan selatan masih belum setara.

Perubahan iklim dan ketahanan bencana tidak dapat lepas dari Indonesia. Tekanan pembangunan telah mendorong deforestasi dan degradasi lingkungan yang tentunya berkontribusi terhadap perubahan iklim. Posisi Indonesia yang rentan terhadap bencana menuntut perlunya ketahanan yang tangguh terhadap bencana. Salah satu jalur bencana Indonesia yaitu berada di Provinsi Jawa Barat yang ancamannya berupa

gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Untuk Kota Sukabumi sendiri, risiko bencana yang tinggi yaitu terkait gempa bumi, banjir, dan tanah longsor.

Konflik sosial masih menjadi salah satu hal yang potensial terjadi ke depannya. Arus globalisasi telah menggerus nilai moral dan budaya yang berdampak pada tidak optimalnya keberlangsungan sosial. Konflik agraria akibat pembangunan juga belum dapat diselesaikan menyeluruh dan berpotensi akan selalu ada. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi semakin beragam.

Desentralisasi dan otonomi daerah belum dapat berjalan optimal mengingat pemahamannya yang belum sama antara Pusat dan daerah. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang juga belum optimal akibat kuantitas dan kualitas aparturnya belum merata. Isu ini tentunya juga berpengaruh pada Provinsi Jawa Barat, mengingat wilayahnya luas dan perlu adanya penataan baru agar pelaksanaan otonomi lebih efektif dan efisien. Pada konteks Kota Sukabumi, isu tata kelola pemerintahan juga masih akan dihadapi untuk ke depannya terutama berkaitan dengan adaptasi perkembangan zaman dan inovasi.

3.3.3 Isu Regional Jawa Barat

Isu regional yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap Kota Sukabumi diidentifikasi dari RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan laporan/kajian resmi lainnya. Isu regional tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.5 Isu Regional



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh signifikan terhadap orientasi bisnis dan investasi yang mengarah ke Provinsi Jawa Barat. Dengan keterbatasan pengembangan wilayah di Jakarta, Provinsi Jawa Barat yang terkoneksi langsung dengan berbagai infrastrukturnya akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan bisnis dan investasi. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap Kota Sukabumi mengingat konektivitas dengan Jakarta semakin membaik.

Ekonomi hijau, biru, dan digital akan menjadi tumpuan penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Barat ke depannya. Pengembangan ekonomi ini sejalan dengan paradigma keberlanjutan dan didukung dengan adanya potensi besar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ekonomi ini juga akan berpengaruh terhadap Kota Sukabumi terutama ekonomi kreatif dan digital. Hal ini tidak lepas dari Kota Sukabumi yang memang tidak memiliki sumber daya alam.

Kualitas SDM dan penduduk usia lanjut akan menjadi tantangan terbesar Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2045. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Provinsi Jawa Barat masih akan memiliki penduduk terbesar di Indonesia. Sementara rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi demikian sejalan dengan Kota Sukabumi sehingga untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi perlu perbaikan kualitas SDM eksisting, penyiapan SDM (usia dini, anak-anak, dan remaja) yang akan mengambil peran ke depannya dan penyediaan layanan sosial bagi penduduk usia lanjut.

Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini lebih berorientasi di wilayah utara dan tengah. Kondisi demikian menyebabkan konektivitas di wilayah selatan belum optimal terkoneksi dengan seluruh wilayah. Hal ini diperparah dengan penyediaan infrastruktur dasar yang juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Kesenjangan pembangunan ini tentunya berpengaruh pada Kota Sukabumi yang posisinya relatif berada di wilayah selatan. Di Kota Sukabumi pun pembangunan di wilayah utara dan selatan juga masih timpang.

Perubahan iklim dan ketahanan pangan merupakan isu krusial di Provinsi Jawa Barat. Perubahan iklim yang drastis akibat pemanasan global telah menyebabkan berbagai konsekuensi serius di berbagai sendi

kehidupan. Meskipun daya dukung penyediaan pangan di Provinsi Jawa Barat belum melampaui ambang batas, namun tekanan pembangunan yang mengarah pada industrialisasi yang masif merupakan ancaman tersendiri bagi kondisi ketahanan pangan. Kondisi demikian juga berpengaruh pada Kota Sukabumi. Konektivitas yang makin baik dan tekanan pembangunan yang terjadi menyebabkan ketersediaan pangan menjadi ancaman serius mengingat luas wilayah Kota Sukabumi yang terbatas.

Modernisasi dan urbanisasi di Provinsi Jawa Barat suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari di tengah arus globalisasi dan industrialisasi. Kondisi demikian juga berpengaruh pada Kota Sukabumi, mengingat perannya sebagai kota transit yang memiliki aksesibilitas dengan daerah sekitarnya menyebabkan perpindahan orang tidak dapat dihindari.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang besar menjadikan penataan daerah otonom dan tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Kondisi demikian tentunya akan berpengaruh pada Kota Sukabumi yang dalam pengelolaan pemerintahan agar adaptif dan responsif.

3.4 ISU BERDASARKAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT

Berdasarkan penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara *online*, rumusan isu Kota Sukabumi yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

1. SDM kreatif dan inovatif

Di era globalisasi, SDM yang kreatif dan inovatif adalah aset berharga. SDM yang kreatif dan inovatif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan nilai tambah, dan memecahkan masalah yang kompleks. Berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Sukabumi, setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang banyak disuarakan terkait pengembangan SDM untuk 20 tahun ke depan, diantaranya kreatif, inovatif, jujur, berakhlak, kompeten, dan berdaya saing.

Gambar 3.6 Kata Kunci Isu SDM



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Hal tersebut sejalan dengan konteks era globalisasi yang lebih mengedepankan kreativitas dan inovasi untuk dapat memenangkan kompetisi yang semakin intens. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang memiliki keterampilan kreatif dan inovatif adalah investasi yang berharga bagi masyarakat Kota Sukabumi.

2. Infrastruktur ramah lingkungan

Infrastruktur ramah lingkungan merupakan konsep desain dan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan keberlanjutan dan meminimasi dampak negatif terhadap lingkungan alam. Ini adalah langkah penting dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan mempromosikan pelestarian sumber daya alam. Pentingnya infrastruktur ramah lingkungan ternyata banyak disuarakan masyarakat Kota Sukabumi. Berdasarkan masukan dalam penjarangan aspirasi, masyarakat Kota Sukabumi berharap agar pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan alam. Hal tersebut tentu saja harus tertata dengan baik, terintegrasi, tahan bencana, dan mengutamakan penggunaan teknologi terkini.

Gambar 3.7 Kata Kunci Isu Infrastruktur



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

3. Pengembangan UMKM dan daya saing daerah

Produktivitas yang tinggi adalah kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi itu, UMKM yang berdaya saing akan lebih mungkin bertahan dan tumbuh dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Mereka selalu berusaha untuk meningkatkan diri, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga fokus pada kepuasan pelanggan. Daya saing yang kuat membantu UMKM untuk meraih kesuksesan jangka panjang di pasar yang terus berubah. Sejalan dengan aspirasi masyarakat Kota Sukabumi, pengembangan UMKM yang mampu bersaing di pasar secara efektif banyak disuarakan. Masyarakat menyadari bahwa dengan kemajuan teknologi dan keterbatasan sumber daya alam, Kota Sukabumi cocok bagi tumbuh kembangnya UMKM. Karena itu, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam UMKM semakin baik dalam pengembangan ekonomi inklusifnya.

Gambar 3.8 Kata Kunci Isu Ekonomi dan Daya Saing Daerah



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

4. Penguatan budaya lokal

Dalam konteks globalisasi, penting untuk menghormati dan mendukung budaya lokal sambil mempromosikan dialog antar-budaya dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Budaya lokal ini sangat signifikan karena budaya lokal adalah identitas, nilai-nilai, tradisi, bahasa, dan warisan budaya yang membentuk jati diri masyarakat.

Gambar 3.9 Kata Kunci Isu Sosial Budaya



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Masyarakat Kota Sukabumi pun menyadari akan pentingnya budaya lokal. Hal itu tercermin dari aspirasi yang banyak menyuarakan tentang pentingnya budaya lokal di era globalisasi. Karena itu, penguatan sosial budaya masyarakat merupakan modalitas yang penting dalam pembangunan sehingga identitas, nilai-nilai, dan tradisi tetap terjaga.

5. Lingkungan hidup nyaman dan asri

Lingkungan hidup yang asri dan nyaman merujuk pada tempat atau wilayah yang memberikan kenyamanan fisik, emosional, dan psikologis bagi individu atau masyarakat yang tinggal di dalamnya. Lingkungan yang asri dan nyaman menciptakan suasana yang dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Gambar 3.10 Kata Kunci Isu Lingkungan Hidup



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan penjarangan aspirasi, masyarakat Kota Sukabumi berharap agar lingkungan hidup asri dapat memberikan kenyamanan. Hal ini membutuhkan perencanaan perkotaan yang bijak, pelestarian alam, dukungan terhadap keamanan dan kualitas bangunan, dan kota yang bebas dari polusi.

6. Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah, pemerintahan yang modern dan inovatif menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan zaman. Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif merujuk pada pendekatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk ke depannya, masyarakat Kota Sukabumi berharap agar tata kelola pemerintahan modern dan inovatif memberi dampak positif terhadap pelayanan publik yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Hal ini juga membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.

Gambar 3.11 Kata Kunci Isu Tata Kelola Pemerintahan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2023

3.5 ISU STRATEGIS KOTA SUKABUMI

Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks, dan penjarangan aspirasi masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas serta dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kota Sukabumi untuk 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.12 Isu Strategis Kota Sukabumi



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

1. Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan membawa pengaruh terhadap Kota Sukabumi. Aksesibilitas yang memadai dan terkoneksi langsung dengan Jakarta akan menjadi pilihan menarik bagi pengembangan investasi terutama di sektor riset dan teknologi serta pusat agrobisnis dan perdagangan. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan ke depannya.

Gambar 3.13

Rumusan Isu Strategis Investasi dan Optimalisasi Potensi Ekonomi

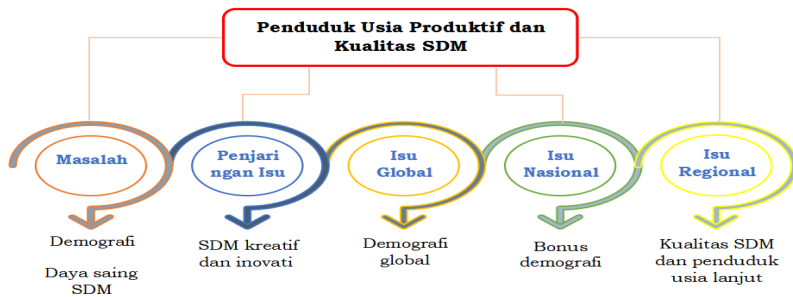


Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

2. Penduduk usia produktif dan kualitas SDM

Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif di Kota Sukabumi perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kota Sukabumi untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi dengan perbaikan kualitas SDM eksisting, penyiapan SDM (usia dini, anak-anak, dan remaja) yang akan mengambil peran ke depannya dan penyediaan layanan sosial bagi penduduk usia lanjut.

Gambar 3.14
Rumusan Isu Strategis Penduduk Usia Produktif dan Kualitas SDM



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

3. Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur

Pembangunan Kota Sukabumi yang lebih berorientasi di wilayah utara menyebabkan wilayah selatan belum berkembang optimal. Adanya rencana pemindahan pusat pemerintahan dan adanya Tol Bocimi khususnya seksi-4 merupakan peluang untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur kota yang ramah lingkungan, terintegrasi, dan memanfaatkan teknologi menjadi tuntutan yang harus disediakan sebagai antisipasi perkembangan kota yang masif.

Gambar 3.15
Rumusan Isu Strategis Ketimpangan Wilayah dan Pembangunan infrastruktur



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

4. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Kota Sukabumi yang berada di kaki gunung dan tekanan pembangunan yang makin masif memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Ancaman perubahan iklim dan ketahanan pangan perlu diantisipasi sejak dini. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana juga perlu peningkatan.

Gambar 3.16
Rumusan Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

5. Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal

Modernisasi dan urbanisasi di Kota Sukabumi berimplikasi pada persoalan sosial masyarakat yang makin meningkat. Kondisi demikian diperparah dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah menyasar seluruh wilayah sehingga ancaman degradasi moral dan budaya lokal tak dapat dihindarkan.

Gambar 3.17
Rumusan Isu Strategis Perlindungan Sosial dan Penguatan Budaya Lokal

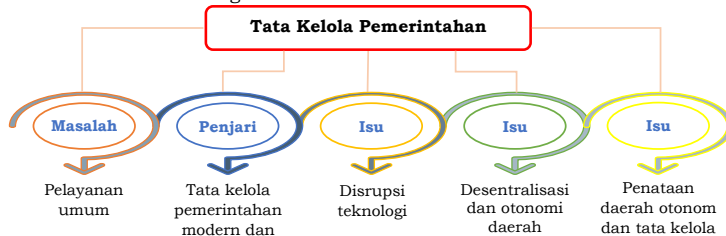


Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

6. Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif

Tutupan perkembangan Kota Sukabumi berimplikasi pada pengelolaan pelayanan publik yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

Gambar 3.18
Rumusan Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tabel 3.1 Pemetaan Isu Strategis Kota Sukabumi

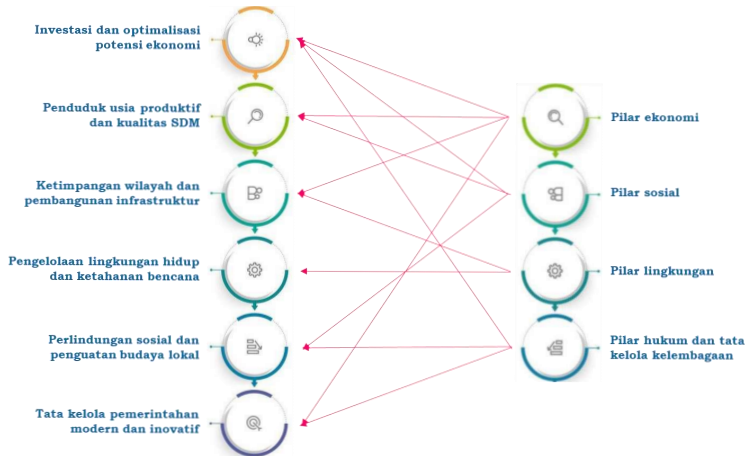
PERMASALAHAN	PENJARINGAN ISU DARI MASYARAKAT	ISU SESUAI KONTEKS			ISU STRATEGIS KOTA SUKABUMI
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya saing ekonomi ▪ Kesejahteraan ekonomi 	Pengembangan UMKM dan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geopolitik dan geoekonomi ▪ Disrupsi teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpindahan IKN ▪ Ekonomi hijau dan ekonomi biru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orientasi bisnis dan investasi ▪ Ekonomi hijau, biru, dan digital 	Investasi dan optimalisasi potensi ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demografi ▪ Daya saing SDM 	SDM kreatif dan inovatif	Demografi global	Bonus demografi	Kualitas SDM dan penduduk usia lanjut	Penduduk usia produktif dan kualitas SDM
Daya saing infrastruktur	Infrastruktur ramah lingkungan	Geopolitik dan geoekonomi	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Pemerataan akses dan infrastruktur dasar	Ketimpangan wilayah dan pembangunan infrastruktur
Geografis	Lingkungan hidup nyaman dan asri	Krisis iklim	Perubahan iklim dan ketahanan bencana	Perubahan iklim dan ketahanan pangan	Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesejahteraan sosial budaya ▪ Daya saing iklim investasi 	Penguatan budaya lokal	Persaingan sumber daya alam	Konflik sosial	Modernisasi dan urbanisasi	Perlindungan sosial dan penguatan budaya lokal
Pelayanan umum	Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif	Disrupsi teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Penataan daerah otonom dan tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan modern dan inovatif

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan KLHS, isu yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Isu pilar sosial terutama terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan, *stunting* dan kemiskinan.
2. Isu pilar ekonomi terutama terkait dengan dukungan terhadap UKM/UMKM, dukungan pariwisata, seni dan budaya lokal serta kesenjangan ekonomi;
3. Isu pilar lingkungan terutama terkait dengan penanganan sampah, pencemaran, kebencanaan dan penataan kota atau alih fungsi lahan;
4. Isu pilar hukum dan tata kelola kelembagaan terutama terkait dengan kekerasan anak dan perempuan.

Gambar 3.19
Keterkaitan Isu Strategis Kota Sukabumi dengan
Isu Hasil Kajian KLHS



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 VISI

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi RPJPN 2025-2045, yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia 2045:
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024

Visi tersebut selanjutnya dilengkapi dengan 5 (lima) Sasaran Visi, 8 (delapan) Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan) dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, yang secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan visi tersebut pada peringatan 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir RPJPN 2025 - 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

4.1.2 Visi Jawa Barat 2045

Pada tahun 2045, Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi provinsi yang memiliki standar kualitas tinggi melebihi provinsi lainnya di

Indonesia dan mampu bersaing dengan standar internasional. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif. Dengan demikian Visi Jawa Barat 2045 yaitu: Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan.

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 tersebut merupakan keberlanjutan dari Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia”. Visi Tahun 2005-2025 berorientasi berorientasi maju lingkup Indonesia, sedangkan Visi Tahun 2025-2045 akan berorientasi pada tingkat dunia.

Gambar 4.3
Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, 2024 (diolah)

Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas

lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern.

Kemajuan tersebut termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

Berdaya Saing Dunia merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerjasama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif, dan inovatif, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi. Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat dalam jangka panjang.

Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara dan sampah),

menerapkan praktik pertanian organik dan memanfaatkan energi baru terbarukan serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya.

4.1.3 Visi Kota Sukabumi 2045

Kota Sukabumi dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai *Burgerlijk Bestuur* dengan status *Gemeenteraad Van* Sukabumi pada 1 April 1914. Kota ini bersifat eksklusif (*enclave*) karena dimaksudkan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Belanda dan Eropa sebagai pengelola perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Lebak. Dalam perkembangannya dari sebuah dusun menjadi kota, berbagai fasilitas perkotaan dibangun secara bertahap di Sukabumi mulai pendopo, tangsi militer/polisi, pengadilan, alun-alun (*Victoria Park*), pemakaman umum, rumah ibadah, rumah pegadaian, kantor telepon dan telegraf, sekolah-sekolah (termasuk sekolah pertanian). Ini dibarengi dengan berdirinya berbagai korporasi seperti Pabrik Es Petojo dan Apotek Gedeh (kini Kimia Farma). Selain itu, dibangun juga sejumlah tempat penanda denyut kota seperti ruang orkestra, dansa dan pertemuan (*Capitol*) dan juga rumah bola dan tempat pertemuan (*Soceitet Sukamanah*). Tak ketinggalan dibangun juga jaringan transportasi seperti kereta api dan jalan raya yang berakses langsung ke pelabuhan samudera di Jakarta.

Mempertimbangkan lintasan sejarah perkembangan Kota Sukabumi, isu strategis yang sudah disepakati, Visi Indonesia Emas 2045, dan Visi Jawa Barat 2045 maka harapan Kota Sukabumi 20 (dua puluh) tahun ke depan perlu untuk dirumuskan. Harapan yang dinyatakan dalam pernyataan visi penting agar menjadi dorongan bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkannya. Untuk itu, Visi Kota Sukabumi 2045 yaitu: Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Gambar 4.4 Visi Kota Sukabumi 2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Kota Kreatif

Kota Kreatif adalah kota yang sumber daya manusianya memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan atau mengembangkan sesuatu dalam rangka menangani permasalahan dan tantangan kehidupan. Kota kreatif juga merupakan konsep yang menekankan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif, seni, budaya, dan inovasi di suatu kota. Ini melibatkan pembangunan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri kreatif. Tujuannya adalah menciptakan kota yang dinamis, beragam, dan inovatif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, ekspresi budaya, dan kolaborasi antar sektor.

Kota Sukabumi tidak dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Potensi yang dapat dioptimalkan tentunya bertumpu pada sumber daya manusianya. Untuk itu, tumpuan ekonomi Kota Sukabumi ke depannya yaitu pada ekonomi kreatif yang lebih mengandalkan kreativitas dan inovasi masyarakatnya. Pada tahun 2045, Kota Sukabumi diharapkan sudah menjadi kota kreatif yang bertumpu pada kualitas masyarakatnya untuk menggerakkan perekonomian yang tentunya mengarah pada ekonomi kreatif hijau. Maksudnya adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif tersebut sudah mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rantai produksi dan distribusinya.

Kota Unggul

Kota Unggul adalah adalah kota yang maju dengan sumber daya manusia, infrastruktur, layanan, dan ekonomi yang mempunyai kelebihan atau lebih baik dibanding dengan daerah lainnya. Kota unggul menawarkan kesempatan kerja yang variatif, sistem pendidikan yang bagus, infrastruktur transportasi yang memadai, serta layanan kesehatan dan fasilitas umum yang berkualitas tinggi. Kota unggul cenderung menjadi pusat ekonomi, budaya, dan inovasi bagi wilayah sekitar.

Salah satu kunci bagi kemajuan Kota Sukabumi adalah sumber daya manusia. Maka dengan pembangunan yang berfokus pada sumber daya manusia, kota ini akan mempunyai berbagai keunggulan di segala bidang ke depannya. Kota ini juga harus menjadi pusat bagi pengembangan sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal dan terutama melalui pendidikan non formal.

Kota Berbudaya

Kota Berbudaya adalah kota dimana penduduknya memiliki pikiran, perasaan, akal budi dan budaya yang sudah maju. Kota berbudaya merujuk pada kota yang memiliki beragam aspek budaya yang kuat dan beragam. Kota berbudaya bukan hanya tentang kekayaan sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kebudayaan tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat modern termasuk didalamnya adalah budaya religius yang dimiliki masyarakat Kota Sukabumi.

Kota Sukabumi diharapkan menjadi kota berbudaya dengan dicirikan antara lain adanya keanekaragaman etnis dan budaya, warisan sejarah dan arsitektur, seni dan budaya kontemporer, pendidikan dan literasi yang mendukung perkembangan budaya, keragaman kuliner, partisipasi yang tinggi dari berbagai komunitas serta masyarakatnya yang kental dengan perilaku religius.

Kota Berkelanjutan

Kota Berkelanjutan merupakan konsep pembangunan kota yang berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup

upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, mempromosikan transportasi berkelanjutan, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat.

Kota Sukabumi harus tetap menjaga kesinambungan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan, keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial serta pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

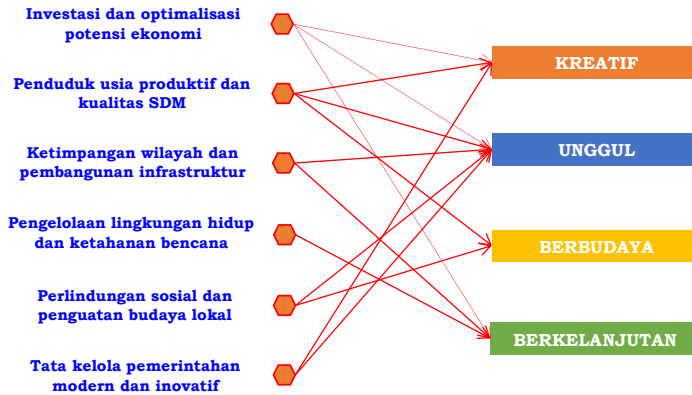
Konsepsi dari Visi Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan dimaknai bahwa Kota Sukabumi sebagai tempatnya bagi sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas. Hal tersebut berarti bahwa Kota Sukabumi sebagai tempat dihasilkannya sumber daya manusia yang kreatif dan unggul melalui pendidikan formal ataupun non formal, serta tempat bagi sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kreatifitasnya. Hal tersebut sejalan dengan peluang bonus demografi yang akan dihadapi dimana penduduk usia produktif Kota Sukabumi pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 66.95 persen dari jumlah penduduk.

Melalui sumber daya manusia yang kreatif maka akan tercipta berbagai inovasi dan kreativitas dalam menangani permasalahan dan tantangan yang tentunya akan semakin besar ke depannya. Sumber daya manusia tersebut akhirnya akan mendorong berkembangnya ekonomi dan industri kreatif yang akan menjadi fokus pembangunan kedepannya. Dengan demikian akan dihasilkan berbagai keunggulan dari segala bidang dan menjadikan kota Sukabumi menjadi lebih maju di bandingkan daerah lainnya. Selanjutnya dengan keunggulan tersebut maka akan terwujud sumber daya manusia yang berkarakter, Inovatif dan religius yang akhirnya akan mewujudkan Kota Sukabumi sebagai Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Selanjutnya dalam implementasi proses pembangunan Kota Sukabumi juga harus senantiasa mempertimbangkan aspek kesinambungan dengan berfokus pada kelestarian, keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga generasi yang akan datang tetap bisa melanjutkan pembangunan tanpa ragu untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan.

Visi tersebut tentu sudah sejalan dengan isu strategis Kota Sukabumi yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya. Adapun keterkaitan isu strategis dengan Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 sebagaimana pada gambar dibawah ini.

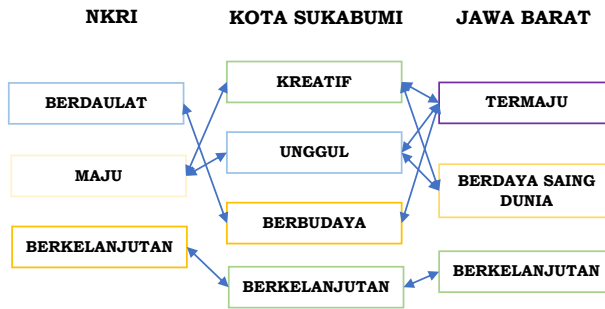
Gambar 4.5
Keterkaitan Isu Strategis dengan Visi Kota Sukabumi 2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Selain itu, apabila kita telaah lebih dalam maka akan terlihat sinkronisasi yang jelas antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD Kota Sukabumi. Berikut gambaran sinkronisasi tersebut.

Gambar 4.6
Sinkronisasi Visi RPJPN, RPJPD Provinsi dan Kota Sukabumi 2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa visi kreatif dan unggul itu selaras dengan visi maju dalam RPJPN dan termaju serta berdaya saing dalam RPJPD Provinsi, artinya bahwa kreatifitas dan keunggulan kota sukabumi akan mendukung Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi termaju dan berdaya saing dunia serta pada akhirnya akan mendukung pula visi maju NKRI. Visi berbudaya selaras dengan termaju di Provinsi Jawa barat yang artinya bahwa keanekaragaman budaya yang dimiliki Kota Sukabumi dapat mendukung kemajuan Jawa Barat serta akan menjadikan NKRI semakin bersatu dan berdaulat. Visi berkelanjutan sudah sangat selaras dengan Provinsi dan NKRI bahwa Kota Sukabumi sangat mendukung upaya pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan semua aspek baik sosial, ekonomi maupun lingkungan serta tentunya mendukung pula upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Visi merupakan sebuah cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Namun demikian visi haruslah tetap bisa terukur agar dapat di evaluasi tingkat ketercapaiannya. Sebagai acuan keberhasilan visi maka telah ditetapkan sasaran visi yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang dapat dilakukan pengukuran setiap periode tertentu untuk mengetahui apakah arah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai atau belum dalam mendukung pencapaian visi tersebut.

Gambar 4.7 Sasaran Visi Kota Sukabumi 2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tabel 4.1
Keselarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045				RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US\$)	5,500	30,300	Pendapatan per kapita meningkat	PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Meningkatkan perekonomian kota	PDRB per Kapita (Rp Juta)	45,29 - 45,65	79,79 - 131,87
	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54,65	186,06		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	3,70
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60				
Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kemiskinan (%)	6,36 - 7,02	0,1 - 0,63
	Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390	0,357 - 0,380		Rasio Gini	0,432 - 0,439	0,405 - 0,428
	Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77		Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	0,58	0,51
								Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08 - 5,58	5,2 - 6,4	

RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045				RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,87	5,00	Meningkatnya Kepemimpinan daerah dalam dunia Internasional	Indeks Daya Saing Daerah	3,63 Tinggi	4,23 Sangat Tinggi
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,69	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	77,90	87,90
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	0,14	5,24
									Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,28	66,32

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

4.2 MISI

4.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Gambar 4.8
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (diolah)

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian,

ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestic dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesenambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.2.2 MISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2045

Untuk mewujudkan Provinsi Jawa Barat Mandiri, Unggul dan Berkelanjutan diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi

tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat 2045 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dilakukan untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menggabungkan aspek moralitas dan profesional dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki karakter, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir sesuai perkembangan zaman. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perluasan akses dan perbaikan pelayanan kesehatan prima untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, pelatihan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat.

2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Upaya ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi yang lebih memberikan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas ekonomi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

3. Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.

4. Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi

Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.

5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan ditujukan untuk membentuk masyarakat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, pengembangan budaya, peningkatan kualitas keluarga dan pemuda, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, air, energi serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang

dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah mencakup pengembangan jalan, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup pengembangan perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan secara terpadu.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pembangunan per tahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, Upaya ini dilakukan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan majemen risiko yang efektif dan efisien.

Gambar 4.9 Delapan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2045



4.2.3 Misi Pembangunan Kota Sukabumi 2045

Untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai, maka diperlukan rumusan misi untuk mewujudkan visi. Rumusan misi untuk mewujudkan Visi Kota Sukabumi selain didasarkan pada visi juga mempertimbangkan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045 dan Misi Pembangunan Jawa Barat 2045. Karena itu, Misi Kota Sukabumi 2045, yaitu:

Gambar 4.10 Misi Kota Sukabumi 2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing

Pengembangan ini dilakukan mulai tingkat individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan yang lebih luas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

2. Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Percepatan ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, pengembangan ekosistem inovasi/digital/wirausaha, pengembangan UMKM dan koperasi, penerapan ekonomi hijau/kreatif/digital, dan perluasan pasar produksi bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

3. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Inovatif

Penguatan ini dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan kota, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan inovasi daerah.

4. Meningkatkan Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu modal dasar dalam menjalankan pembangunan. Apabila kondisi ketenteraman dan ketertiban umum bisa terus terjaga dengan baik maka akan menimbulkan stabilitas pembangunan di semua bidang. Investasi akan terus berjalan dan meningkat, proses pembangunan akan terus berlanjut serta gairah ekonomi juga akan tetap berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah dengan melibatkan seluruh sektor baik aparaturnya TNI, Polri, SatpolPP serta unsur masyarakat seperti Linmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Ramah Lingkungan

Misi ini merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tetap menjaga nilai-nilai religiusitas, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan yang selama ini di terapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pendidikan karakter yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar tetap bisa menjaga nilai-nilai etika dan moral yang positif yang telah diwariskan sebelumnya. Selain itu, nilai kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca.

6. Menyediakan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Penyediaan ini dilakukan dengan pemerataan infrastruktur di wilayah yang masih kurang berkembang, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, revitalisasi kota, penambahan RTH, peningkatan estetika kota, mencegah alih fungsi lahan, meningkatkan ketahanan iklim dan ketahanan bencana.

7. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berkualitas

Penyiapan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas merupakan sebuah investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat mensupport pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, serta menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan membangun infrastruktur perkotaan

mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta teknologi informasi secara terintegrasi.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Misi ini merupakan sebuah komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana.

Keselarasn Agenda/Misi RPJPN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Keselarasn Agenda/Misi RPJPN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KAB/KOTA 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
3		Transformasi tata kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Meningkatkan stabilitas Ketentraman dan ketertiban Umum
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan ramah lingkungan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	Menyediakan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KAB/KOTA 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Menyiapkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berkualitas
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kota Sukabumi 2045 dibutuhkan nilai-nilai ideal yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Nilai-nilai luhur Pancasila tentunya menjadi nilai dasar yang melandasi hal tersebut. Di samping itu, nilai-nilai yang sudah tertanam di masyarakat Kota Sukabumi perlu juga untuk dipedomani seperti “Religius, Ramah, Toleran, dan Guyub” (Regreg).

Relijiusitas masyarakat Kota Sukabumi sudah dikenal dari dulu. Terlebih Kota Sukabumi juga dikenal sebagai Kota Santri. Sikap religiusitas yang disertai rasa syukur sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kota Sukabumi yang masih merupakan bagian dari budaya Sunda, tak lepas dari citra masyarakatnya yang dikenal lembut, periang, sopan, dan tentunya ramah. Selain itu, kebiasaan saling menghormati, tepa selira, dan toleran agar kehidupan masyarakat tidak dipenuhi oleh bentakan dan hentakkan juga sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga mencerminkan semangat untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja bersama demi kebaikan bersama tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Selain itu, masyarakat Kota Sukabumi juga dikenal guyub, yaitu tidak berisik dan cék-cok oleh permasalahan yang tidak substantif. Prinsip guyub menekankan pentingnya saling mendukung, bekerja sama, serta menjaga hubungan yang baik antara satu sama lain dalam suatu komunitas.

Adanya nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan misi, diharapkan dapat menjadi modalitas penting dalam mewujudkan Visi Kota Sukabumi 2045. Dengan demikian, perwujudan visi Kota Sukabumi dapat berkontribusi serta bagian integral dari perwujudan Jawa Barat Tahun 2045 dan perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

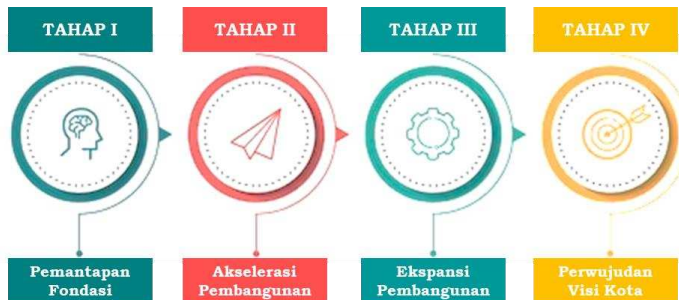
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045 merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Perumusan arah kebijakan ini juga memperhatikan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti proses pentahapan ini, kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.

Gambar 5.1 Pentahapan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capain kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.2 Fokus Pematapan Fondasi



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tahap kedua adalah akselerasi pembangunan. Dengan makin mantapnya fondasi pembangunan maka proses percepatan untuk perubahan pembangunan semakin mudah dilakukan. Akselerasi pembangunan pada tahap ini masih terbatas pada aspek/sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan yang optimal sehingga dapat menggerakkan aspek/sektor lainnya. Fokus yang dilakukan pada tahap kedua seperti pada gambar di bawah ini.

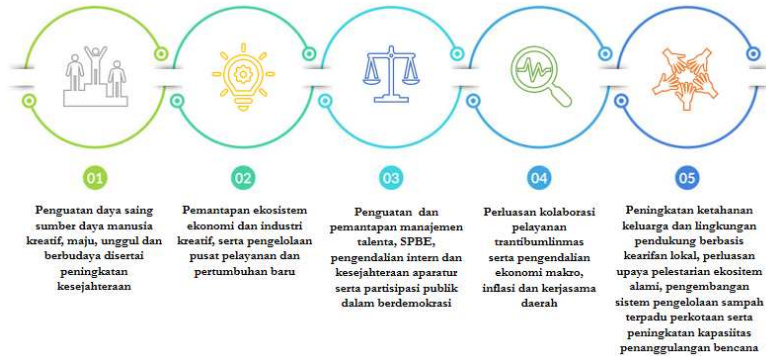
Gambar 5.3 Fokus Akselerasi Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tahap ketiga adalah ekspansi pembangunan. Pada tahap ini, percepatan pembangunan tidak terbatas hanya pada aspek/sektor tertentu tetapi sudah dilaksanakan pada semua aspek/sektor. Percepatan pembangunan di semua aspek/sektor ini diharapkan akan semakin mendekatkan pada perwujudan Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan. Fokus yang dilakukan pada tahap ketiga seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.4 Fokus Ekspansi Pembangunan



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tahap keempat adalah perwujudan Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan. Tahap ini merupakan akumulasi keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya sehingga Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan dapat terwujud. Pada tahap ini, percepatan pembangunan di segala aspek/sektor tetap dilakukan. Fokus yang dilakukan pada tahap keempat seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.5 Fokus Perwujudan Visi Kota



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Apabila kita sandingkan, maka fokus arah kebijakan setiap periode atau tahap pembangunan berdasarkan area transformasi dapat dilihat pada Tabel 5.1. Fokus arah pembangunan tersebut bisa menjadi salah satu acuan makro bagi pemerintah daerah di setiap periode pembangunan dalam menyusun arah kebijakannya. Selanjutnya untuk arah kebijakan secara rinci sesuai dengan pentahapan dan arah pembangunan Kota Sukabumi 2025-2045 dapat dilihat pada tabel 5.2. Arah kebijakan tersebut merupakan hasil analisis berdasarkan arah kebijakan transformasi RPJPN, arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan analisis dan masukan dari para akademisi dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan proises yang telah dilewati. Selain itu yang tak kalah penting adalah bahwa arah kebijakan tersebut sudah mempedomani dan melihat keselarasan dengan rekomendasi KLHS RPJPD yang secara bersamaan juga dilakukan penyusunan (lampiran 3).

Tabel 5.1 Fokus Arah Kebijakan Berdasarkan Area Transformasi

AREA TRANSFORMASI	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4
Transformasi Sosial	Penyiapan dan Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial adaptif	Pembangunan sumber daya manusia kreatif, maju, unggul dan berbudaya	Penguatan daya saing sumber daya manusia kreatif, maju, unggul dan berbudaya disertai peningkatan kesejahteraan	Perwujudan sumber daya manusia kreatif, maju, unggul dan berbudaya
Transformasi Ekonomi	Penyiapan ekosistem dan industri kreatif, pusat pelayanan dan pertumbuhan baru serta penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa, serta pembangunan pusat pelayanan dan pertumbuhan baru	Pemantapan ekosistem ekonomi dan industri kreatif, serta pengelolaan pusat pelayanan dan pertumbuhan baru	Perwujudan pusat ekonomi dan industri kreatif serta pemerataan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Transformasi Tata Kelola	Peningkatan tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Pengembangan meritokrasi dan digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan edukasi politik dan partisipasi masyarakat	Penguatan dan pemantapan manajemen talenta, SPBE, pengendalian intern dan kesejahteraan aparatur serta partisipasi publik dalam berdemokrasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif disertai pemantapan iklim demokrasi yang kondusif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan trantibumlinmas serta pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah	Peningkatan pelayanan trantibumlinmas serta efektivitas pengendalian inflasi dan kerja sama daerah	Perluasan kolaborasi pelayanan trantibumlinmas serta pengendalian ekonomi makro, inflasi dan kerja sama daerah	Perwujudan stabilitas trantibumlinmas serta pemantapan efektivitas pengendalian inflasi dan kerja sama daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta optimalisasi tata kelola perlindungan lingkungan dan pemenuhan infrastruktur ketahanan bencana	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, peningkatan tata ruang berkelanjutan serta peningkatan perilaku masyarakat yang hemat pangan, air, dan energi	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, perluasan upaya pelestarian ekosistem alami, pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu perkotaan serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Perwujudan masyarakat yang berbudaya dan tangguh terhadap bencana, ketahanan pangan, air dan energi serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan menerapkan prinsip <i>circular economy</i>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan	1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing 2. Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan 3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif 4. Meningkatkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum 5. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan ramah lingkungan	Pelayanan kesehatan untuk semua	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan Pemenuhan rasio tenaga kesehatan sesuai standar Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i>	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat yang kurang mampu	Pengembangan pusat pelayanan kesehatan bagi kawasan sekitar Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan Peningkatan keluarga sadar gizi dan kesehatan prima
		Pendidikan berkualitas yang merata	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat Perluasan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Peningkatan keluarga sehat dan tangguh terhadap penyakit Peningkatan ketahanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana	Penguatan sekolah terbuka, non formal, dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	<p>6. Menyediakan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan</p> <p>7. Menyiapkan sarana dan prasarana perkotaan berkualitas</p> <p>8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan</p>		<p>Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Pemantapan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)</p> <p>Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan berbasis karakter dan budi pekerti di semua jenjang pendidikan</p> <p>Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and</i></p>	<p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal</p> <p>Perluasan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> <p>Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and</i></p>	<p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Perluasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis potensi dan keunggulan kota</p> <p>Pengembangan manajemen talenta dan peserta didik berprestasi</p> <p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk melayani kawasan sekitar</p>	<p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah) yang berkualitas dan terintegrasi</p> <p>Meningkatkan keterkaitan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</p> <p>Pengembangan sistem pendidikan tinggi yang terintegrasi</p>

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			<p><i>Mathematics</i>) dan vokasi berbasis keunggulan wilayah</p> <p>Penguatan masyarakat pembelajar yang literat, kreatif dan inovatif</p>	<p><i>Mathematics</i>)</p> <p>Pengembangan literasi keagamaan dan kebudayaan, terutama melalui media digital</p>	<p>Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi kontemporer berbasis nilai-nilai agama dan kebudayaan untuk kemaslahatan</p>	<p>Penguatan identitas dan jati diri bangsa dalam mewujudkan masyarakat berkebudayaan maju</p>
		Perlindungan sosial yang adaptif	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial	Perluasan penyediaan bantuan sosial bagi kelompok marjinal, dan rentan	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
		Peningkatan produktivitas ekonomi	<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i></p> <p>Penerapan kebijakan dan program pendorong kewirausahaan</p> <p>Penyiapan kebijakan dan kelembagaan riset dan inovasi IPTEK</p>	<p>Percepatan peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja</p> <p>Pengembangan ekosistem kewirausahaan</p> <p>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di kota dalam rangka mendukung percepatan tumbuh</p>	<p>Perluasan peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja pada berbagai bidang</p> <p>Peningkatan wirausaha yang berorientasi nilai tambah</p> <p>Pengembangan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif</p>	<p>Peningkatan produktivitas tenaga kerja</p> <p>Peningkatan kapasitas usaha wirausaha</p> <p>Pemanfaatan riset dan inovasi untuk pengembangan industri dan usaha</p>

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			<p>Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>)</p> <p>Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p> <p>Peningkatan akses permodalan, teknologi dan SDM yang kompeten</p> <p>Pengembangan produk yang berdaya saing</p> <p>Penataan dan restrukturisasi BUMD</p> <p>Penguatan proses bisnis UMKM</p>	<p>kembang IDUKA (industri dunia usaha dunia kerja)</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>)</p> <p>Perluasan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p> <p>Perluasan akses permodalan, teknologi dan SDM yang kompeten</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk yang terintegrasi hulu hilir</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD</p> <p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global</p>	<p>Kapitalisasi potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi</p> <p>Peningkatan daya saing investasi yang menyeluruh</p> <p>Pemantapan akses permodalan, teknologi dan SDM yang kompeten</p> <p>Perluasan pemasaran produk yang berdaya saing</p> <p>Pengembangan bisnis BUMD</p> <p>Perluasan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global</p>	<p>Pengoptimalan ekonomi lokal bagi pertumbuhan kota</p> <p>Pemantapan Kota Sukabumi sebagai destinasi investasi</p> <p>Pengoptimalan akses permodalan, teknologi dan SDM yang kompeten untuk meningkatkan produktivitas usaha</p> <p>Pemantapan produktivitas dan daya saing produk</p> <p>Penyelenggaraan tata kelola BUMD yang profesional</p> <p>Pemantapan UMKM yang berdaya saing</p>

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		Penerapan ekonomi hijau dan kreatif	<p>Penataan pusat perdagangan dan pergudangan</p> <p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan</p> <p>Pengembangan instrumen penerapan ekonomi hijau</p> <p>Peningkatan transisi energi fosil</p> <p>Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif</p> <p>Peningkatan pengembangan kota kreatif</p> <p>Pengembangan kawasan strategis pariwisata</p> <p>Penetapan kawasan dan bangunan cagar budaya</p>	<p>Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pergudangan</p> <p>Pengembangan hilirisasi produk pertanian dan peningkatan tata kelola pertanian</p> <p>Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau</p> <p>Peningkatan optimalisasi efisiensi energi</p> <p>Perluasan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif</p> <p>Pengembangan jaringan kota kreatif</p> <p>Pengembangan pariwisata yang paripurna dengan pemenuhan aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>)</p> <p>Penataan dan revitalisasi di kawasan dan bangunan cagar budaya</p>	<p>Perluasan jalur distribusi perdagangan dan pergudangan</p> <p>Peningkatan daya saing pertanian</p> <p>Perluasan penerapan ekonomi hijau</p> <p>Penguatan mitigasi perubahan iklim</p> <p>Peningkatan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing</p> <p>Perluasan pembangunan kota kreatif</p> <p>Pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan</p> <p>Pengembangan wisata berkonsep <i>city tourism</i> dan <i>heritage tourism</i></p>	<p>Pemantapan pusat perdagangan dan pergudangan skala wilayah</p> <p>Pemantapan daya saing pertanian</p> <p>Pemantapan ekonomi hijau</p> <p>Optimalisasi pertumbuhan ekonomi hijau</p> <p>Ekonomi kreatif penumpu ekonomi kota</p> <p>Pemantapan pembangunan kota kreatif</p> <p>Pengembangan pariwisata berkelanjutan</p> <p><i>City beautification</i> dalam rangka membangun</p>

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
						citra, karakter, dan dignity kota
		Percepatan digitalisasi dan penerapan ekonomi digital	Penyiapan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan	Peningkatan infrastruktur digital untuk menunjang aktivitas masyarakat	Perluasan infrastruktur digital untuk menunjang aktivitas masyarakat	Pemantapan infrastruktur digital untuk menunjang aktivitas masyarakat
		Peningkatan literasi digital masyarakat	Peningkatan literasi digital masyarakat	Pembangunan ekosistem digital	Peningkatan kolaborasi dalam pembangunan ekosistem digital	Pemantapan ekosistem digital
		Peningkatan fungsi hub antar wilayah	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, pada ruas Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang	Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, pada ruas Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang	Pemantapan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik	Perwujudan konektivitas dan akses intraregional Jawa Barat
		Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi	Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi	Akselerasi peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi	Pemantapan dan optimalisasi prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat),	Pemantapan fungsi hub perkeretaapian antarwilayah

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			Pembangunan pusat pelayanan skala regional	Percepatan pembangunan pusat pelayanan skala regional	terutama pada ruas Bogor-Sukabumi Pemantapan pembangunan pusat pelayanan skala regional	Perwujudan Sukabumi Kota Hub
		Pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah yang disusun secara kolaboratif- partisipatif, penyiapan akses serta sarana pendukung persiapan pembangunan pusat pelayanan kota baru dan pusat pertumbuhan lainnya.	Pelaksanaan pembangunan pusat pelayanan kota baru di Cibereum dan pusat pertumbuhan lainnya di sekitar lingkaran selatan serta pengendalian di kawasan pusat pelayanan kota lama Cikole	Peningkatan pengelolaan pusat pelayanan kota baru di Cibereum dan pusat pertumbuhan lainnya di sekitar lingkaran selatan secara inklusif	Peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi kota
		Tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur kota yang adaptif Peningkatan digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi proses bisnis pemerintah	Pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan digitalisasi serta proses bisnis pemerintah	Pengembangan dan pemantapan manajemen talenta, implementasi <i>reward & punishment</i> serta peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN Pemantapan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Penyelenggaraan pemerintah kota yang profesional dan bebas korupsi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			<p>Peningkatan literasi dan pembudayaan inovasi SDM Aparatur/ASN</p> <p>Peningkatan peran pemerintah kota dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat</p> <p>Penguatan integritas partai politik</p> <p>Sinkronisasi substansi dan perodesasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>Peningkatan pelaksanaan manajemen risiko</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p>	<p>Akselerasi pembudayaan inovasi SDM Aparatur/ASN</p> <p>Peningkatan edukasi politik bagi masyarakat</p> <p>Percepatan dan pendalaman nilai-nilai demokrasi partai politik</p> <p>Peningkatan pengendalian dan evaluasi sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>Pengembangan kapasitas ASN dalam analisis risiko</p> <p>Pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna</p>	<p>Pengembangan inovasi kota melalui kolaborasi stakeholder</p> <p>Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam politik</p> <p>Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi bermakna partai politik</p> <p>Peningkatan kualitas sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>Peningkatan efektivitas sistem pengendalian itern</p> <p>Pemantapan partisipasi masyarakat</p>	<p>Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi</p> <p>Pemantapan stabilitas politik</p> <p>Peningkatan kehidupan demokrasi sehat, beretika dan konstruktif serta berkelanjutan</p> <p>Pemantapan kualitas dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang partisipatif</p>
		Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Fasilitasi dan Peningkatan kualitas kolaborasi Forkopimda	Pemantapan kualitas kolaborasi dan kinerja Forkopimda	Pemantapan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			Pemenuhan SPM pelayananan Trantibumlinmas	Peningkatan pelayananan Trantibumlinmas	Perluasan pelayananan Trantibumlinmas yang menjangkau seluruh masyarakat	Pemantapan kualitas pelayananan Trantibumlinmas
		Pengendalian stabilitas ekonomi makro	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Peningkatan efektivitas pengendalian inflasi daerah	Perluasan efektivitas pengendalian inflasi daerah	Pemantapan efektivitas pengendalian inflasi daerah
		Peningkatan kerjasama dan investasi	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	Perluasan kerja sama antarwilayah dan antardaerah dalam pengelolaan kawasan/ wilayah	Peningkatan efektivitas kerja sama antarwilayah dan antardaerah
		Peningkatan masyarakat yang inklusif dan berbudaya	Peningkatan deteksi dini potensi yang mengancam kerukunan antar etnis, agama, dan golongan Peningkatan penggalian dan pendokumentasian nilai luhur budaya lokal	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragam Perluasan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati Penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai luhur budaya lokal
		Peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda dan gender	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Perluasan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan partisipasi aktif anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dalam pembangunan

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Perluasan peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pemantapan kualitas ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan	<p>Peningkatan kesadaran semua pihak akan pentingnya RTH</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan pengendalian pembangunan pada wilayah ekosistem alami</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan</p> <p>Pemenuhan infrastruktur dasar pengelolaan persampahan</p>	<p>Peningkatan luas RTH</p> <p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis</p> <p>Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami</p> <p>Peningkatan kualitas air dan udara</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i></p>	<p>Percepatan perluasan RTH</p> <p>Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>Perluasan upaya pelestarian ekosistem alami</p> <p>Perluasan upaya peningkatan kualitas air dan udara</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan</p>	<p>Optimalisasi fungsi RTH sebagai fungsi konservasi dan pengendalian pencemaran udara</p> <p>Peningkatan perwujudan kota sesuai dengan tata ruang</p> <p>Pemantapan pembangunan kota yang memperhatikan kelestarian ekosistem alami</p> <p>Pemantapan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan</p> <p>Peningkatan pengelolaan persampahan yang memberikan nilai tambah ekonomi</p>

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air baku/air minum dan sanitasi	Pengembangan sistem penyediaan air baku/air minum dan sanitasi	Peningkatan mutu kualitas pelayanan air minum perkotaan yang memenuhi aspek 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan)	Penyelenggaraan penyediaan layanan air baku/air minum dan sanitasi yang merata dan berkualitas
			Peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan	Perluasan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan	Penyelenggaraan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan yang merata dan berkualitas
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penataan kawasan kumuh perkotaan	Perluasan penyediaan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
			Penguatan pengelolaan jaringan jalan kota	Peningkatan konektivitas kota	Perluasan peningkatan konektivitas kota	Pemantapan konektivitas kota
			Peningkatan infrastruktur pejalan kaki, disabilitas, jalur sepeda dan penyediaan lahan parkir <i>off street</i> di Pusat Pelayanan Kota	Perluasan penyediaan infrastruktur pejalan kaki, disabilitas, jalur sepeda dan penyediaan lahan parkir <i>off street</i>	Pengendalian pemanfaatan infrastruktur pejalan kaki, disabilitas, jalur sepeda dan penyediaan lahan parkir <i>off street</i>	Penyelenggaraan infrastruktur kota yang ramah pejalan kaki dan disabilitas

VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
		<p>Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi</p> <p>Peningkatan ketahanan air pada sumber-sumber air dan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air</p> <p>Penguatan kelembagaan dan regulasi pemanfaatan energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah karbon</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan, air, energi kota</p> <p>Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pengembangan <i>urban farming</i></p> <p>Peningkatan ketahanan air pada sumber-sumber air dan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air</p> <p>Penguatan kelembagaan dan regulasi pemanfaatan energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah karbon</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan, air, energi kota</p> <p>Peningkatan kapasitas kota (kebijakan dan kelembagaan) dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana</p>	<p>Peningkatan produktivitas pangan dari lahan yang tersedia dan <i>urban farming</i></p> <p>Pengembangan sumber-sumber air baku dalam meningkatkan pasokan air bersih</p> <p>Inisiasi pemanfaatan energi baru terbarukan dan bahan bakar alternatif rendah karbon</p> <p>Peningkatan perilaku masyarakat yang hemat pangan, air, dan energi</p> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan edukasi di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya</p>	<p>Pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan yang merata dan berkualitas</p> <p>Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air daerah dalam menjaga <i>supply & demand</i> yang sesuai</p> <p>Penyediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan substitusi energi dan bahan bakar alternatif</p> <p>Perluasan perilaku masyarakat yang hemat pangan, air, dan energi</p> <p>Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dalam pengurangan kerentanan bencana</p>	<p>Pengembangan sistem pangan dan distribusinya yang terintegrasi dengan seluruh wilayah produksi</p> <p>Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku untuk kebutuhan masyarakat</p> <p>Pemasyarakatan penggunaan energi dan bahan alternatif rendah karbon</p> <p>Pemantapan budaya masyarakat yang sadar akan ketahanan pangan, air, dan energi</p> <p>Pemantapan pengelolaan kota yang adaptif terhadap bencana</p>

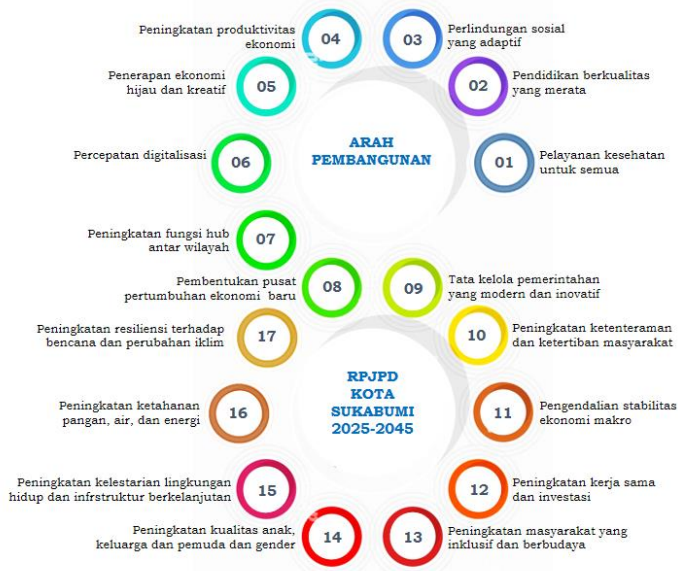
VISI	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
			<p>Penguatan kebijakan tata ruang dan bangunan gedung dengan mempertimbangkan faktor kebencanaan</p> <p>Perkuatan kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>	<p>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana</p> <p>Ketahanan perubahan iklim telah terinternalisasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan</p> <p>Penegakan peraturan dan pengembangan kebijakan serta kelembagaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim</p>	<p>Peningkatan pengelolaan infrastruktur kota yang berketahanan terhadap bencana</p> <p>Pemantapan pengelolaan kota yang berketahanan terhadap perubahan iklim</p>

Sumber: Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan. Koridor pencapaian sasaran pokok tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045. Adapun Arah Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.6 Arah Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Sebanyak 17 (tujuh belas) arah pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045, pada prinsip nya telah mengacu dan selaras dengan arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2045. Keselarasan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Keselarasan arah pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KAB/KOTA 2025-2045
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Pelayanan kesehatan untuk semua
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju	Perlindungan sosial yang ada ptif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Peningkatan produktivitas ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital.	Penerapan ekonomi hijau dan kreatif
		IE 6. Transformasi Digital	Pembangunan SDM berdaya saing	Percepatan digitalisasi
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Peningkatan fungsi hub antar wilayah
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Pengendalian stabilitas ekonomi makro

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045	RPJPD KAB/KOTA 2025-2045
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan kerjasama dan investasi
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan kerukunan umat beragama	Peningkatan masyarakat yang inklusif dan berbudaya
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda dan gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Untuk lebih memantapkan penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2045, perlu juga mempedomani arah kebijakan transformasi yang tertuang dalam RPJPN sesuai dengan wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Arah kebijakan transformasi Kota Sukabumi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
Transformasi sosial	Pelayanan kesehatan untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
Pendidikan berkualitas yang merata		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama</p>
	<p>Perlindungan sosial yang adaptif</p>	<p>Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan</p> <p>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan</p> <p>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.</p> <p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, dan rentan</p>
<p>Transformasi ekonomi</p>	<p>Peningkatan produktivitas ekonomi</p>	<p>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p>

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>.</p>
		<p>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p>
		<p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>
		<p>Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</p>
		<p>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.</p>
		<p>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</p>
		<p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i></p>
		<p>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p>
		<p>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.</p>
		<p>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p>
		<p>Peningkatan produktivitas BUMD.</p>

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	Penerapan ekonomi hijau dan kreatif	<p>Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon.</p> <p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p> <p>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)</p> <p>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p>
	Percepatan digitalisasi	<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis</p> <p>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.</p>

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan</p>
Transformasi tata kelola	Peningkatan fungsi hub antar wilayah	<p>Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cibadak-Palabuhanratu; - Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; <p>Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang.</p>
	Pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru	<p>Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p> <p><i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>, terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p>
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
	Tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif	<p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward & punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.</p> <p>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.</p> <p>Penguatan integritas partai politik</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p> <p>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
stabilitas ekonomi makro daerah	Pengendalian stabilitas ekonomi makro	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .
	Peningkatan kerja sama dan investasi	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
Ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Peningkatan masyarakat yang inklusif dan berbudaya	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda dan gender	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p>
	<p>Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan</p>	<p>Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.</p> <p>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.</p> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.</p> <p>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.</p> <p>Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.</p>

TRANSFORMASI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
	Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan

Sumber: Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Sasaran pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Sukabumi Kota Kreatif, Unggul, Berbudaya dan Berkelanjutan. Sasaran pokok ini didapatkan dari hasil analisis dan sinkronisasi dengan misi, arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi melalui kertas kerja perumusan sasaran pokok (lampiran 2). Selain itu penyusunan sasaran pokok juga telah mempedomani atau melihat keselarasannya dengan rekomendasi KLHS RPJPD yang secara bersamaan juga dilakukan penyusunan (lampiran 4).

Adapun sasaran pokok yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1 Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua

Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya kematian ibu dan angka stunting, meningkatnya penemuan dan kesembuhan penderita *Tuberculosis*, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

2 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas yang merata

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya skor literasi/numerasi siswa berdasarkan asesmen tingkat nasional, meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

3 Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif

Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif di Kota Sukabumi akan ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunnya rasio gini.

4 Meningkatkan produktivitas ekonomi

Meningkatnya produktivitas ekonomi di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya rasio PDRB industri pengolahan, meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, meningkatnya rasio kewirausahaan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.

5 Terwujudnya ekonomi hijau dan kreatif

Terwujudnya ekonomi hijau dan kreatif di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya indeks ekonomi hijau untuk pilar ekonomi, dan meningkatnya Indeks Kota Kreatif.

6 Terwujudnya percepatan digitalisasi

Terwujudnya percepatan digitalisasi di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya skor adopsi teknologi informasi dan komunikasi.

7 Meningkatkan fungsi hub antar wilayah

Meningkatnya fungsi hub antarwilayah di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Konektivitas.

8 Terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru

Terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya rasio terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

9 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik.

10 Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Rasa Aman.

11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro

Terkendalinya stabilitas ekonomi makro di Kota Sukabumi akan ditandai dengan menurunnya tingkat inflasi.

12 Meningkatkan kerja sama dan investasi

Meningkatnya kerja sama dan investasi di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya efektivitas kerja sama daerah dan Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

13 Terciptanya masyarakat yang inklusif dan berbudaya

Terciptanya masyarakat yang inklusif dan berbudaya di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dan meningkatnya Indeks Warisan Budaya.

14 Meningkatkan kualitas anak, keluarga, pemuda, dan gender

Meningkatnya kualitas anak, keluarga, pemuda, dan gender di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga dan menurunnya Indeks Ketimpangan Gender.

15 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan di Kota Sukabumi akan ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman, meningkatnya timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan meningkatnya rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

16 Terwujudnya ketahanan pangan, air, dan energi

Terwujudnya ketahanan pangan, air, dan energi di Kota Sukabumi akan ditandai dengan menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, meningkatnya rasio akses masyarakat terhadap energi, meningkatnya kapasitas air baku, dan meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

17 Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kota Sukabumi akan ditandai dengan menurunnya Indeks Risiko Bencana dan meningkatnya persentase penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka melihat keberhasilan sasaran pokok pembangunan, maka telah di susun Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari 17 (tujuh belas) sasaran pokok tersebut. Indikator Utama Pembangunan tersebut merupakan sebuah gambaran tentang kondisi kota terkini yang dicapai atas hasil pembangunan yang telah dilakukan. Pencapaian IUP tersebut nantinya bisa menjadi acuan tingkat keberhasilan ataupun ketidakberhasilan sebuah pembangunan, dan bisa dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Tabel 5.5 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	Pelayanan kesehatan untuk semua	1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,31	79,62	
		2) Jumlah kasus Kematian Ibu Per Tahun (Jumlah)	8	1	
		3) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	23,52	6,19	
		4) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) (%)	91	98	
		5) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>) (%)	91	98	
		6) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	
Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata	7) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Jenjang SD:			
		i) Literasi (nilai)	65,72	91,80	
		ii) Numerasi (nilai)	47,41	86,28	
		8) Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Jenjang SMP			
		i) Literasi (nilai)	79,52	93,90	
		ii) Numerasi (nilai)	65,02	88,73	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
		9) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	10,73	14,73	
		10) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63	14,71	
		11) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (poin)	97,15	99	
Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	12) Tingkat Kemiskinan (%)	6,36-7,02	0,1-0,63	
Meningkatnya produktivitas ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi	13) Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08 - 5,58	5,2 - 6,4	
		14) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	3,7	
		15) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,29	4,86	
		16) Rasio Kewirausahaan Daerah (persen)	5,34	14,55	
		17) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54-8,21	4,85-6,03	
		18) Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
Terwujudnya ekonomi hijau dan kreatif	Penerapan ekonomi hijau dan kreatif	19) Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi)	67,87	75,89	
		20) Indeks Kota Kreatif (poin)	87,86	100	
Terwujudnya percepatan digitalisasi	Percepatan digitalisasi	21) Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (skor)	4,80	5,00	
Meningkatnya fungsi hub antarwilayah	Peningkatan fungsi hub antarwilayah	22) Indeks Konektivitas	3	3,5	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru	23) Rasio terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru (%)	0	100	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif	Tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif	24) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai)	3,01	4,0	
		25) Indeks Pelayanan Publik (kategori)	A- (Sangat Baik)	A (Pelayanan Prima)	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	26) Indeks Rasa Aman (poin)	77,43	88,44	
Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Pengendalian stabilitas ekonomi makro	27) Tingkat Inflasi (%)	3,04	2,44	
Meningkatnya kerja sama dan investasi	Peningkatan kerja sama dan investasi	28) Efektivitas Kerja Sama Daerah	85	95	
		29) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	16,12	17,11	
Terciptanya masyarakat yang inklusif dan berbudaya	Peningkatan masyarakat yang inklusif dan berbudaya	30) Indeks Warisan Budaya (poin)	38,85	40,85	
		31) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (poin)	79,00	84,43	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
Meningkatnya kualitas anak, keluarga, pemuda, dan gender	Peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda, dan gender	32) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,46	82,22	
		33) Indeks Ketimpangan Gender (poin)	0,211	0,113	
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan	34) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (poin)	88,37	89,31	
		35) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	35,88	100	
		36) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,28	66,32	
		37) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,69	78,19	
		38) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,63	80,27	
		39) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	89,01	100	
Terwujudnya ketahanan pangan, air, dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi	40) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	3,74	0,25	
		41) Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi (%)	99	100	
		42) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,56	2,06	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KETERANGAN
			Baseline 2025	Target 2045	
		43) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	24,30	100	
Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44) Indeks Risiko Bencana (IRB) (skor)	92,89	92,21	
		45) Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	26.699,28	693.081,40	

Sumber: Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

Tabel 5.6 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL			TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk Semua			Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua			Pelayanan Kesehatan untuk Semua		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80,0	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	75,31	79,62
2	Kesehatan Ibu dan Anak			2. Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151	15	2. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	8	1
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,0	5	3. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,52	6,19
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	76	3. Penanganan Tuberkulosis:			4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	91	98
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	95	95			
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88	98	5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91	98
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,52	99,5	6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas yang Merata		

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
5	Hasil pembelajaran			5. Hasil pembelajaran:			Hasil pembelajaran:		
a.	Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			7. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Jenjang SD:		
	- Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	25,93 – 33,33	70,37 – 74,07	i. Literasi Membaca	65,72	91,80
	- Matematika	404	490	ii) Numerasi	7,41 – 14,81	62,96 – 66,67	ii. Numerasi	47,41	86,28
	- Sains	416	487	b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			8. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Jenjang SMP:		
				i) Literasi Membaca	45,30 – 47,30	71,42 – 73,42	i. Literasi Membaca	79,52	93,90
				ii) Numerasi	34,83 – 36,83	63,01 – 65,01	ii. Numerasi	65,02	88,73
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 – 9,53	12,05 – 12,09	9. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,73	14,73
c.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 – 12,88	14,24 – 14,29	10. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,63	14,71
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64 – 14,50			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,19	75,00			
							11. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (poin)	97,15	99
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju			Perlindungan Sosial yang Adaptif		
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09 - 0,34	12. Tingkat Kemiskinan (%)	6,36-7,02	0,1-0,63
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04			
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70			
TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI			TRANSFORMASI EKONOMI			
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah			Peningkatan Produktivitas Ekonomi		
11	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60	13. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,82	3,70
12	Pengembangan Pariwisata			12. Pengembangan Pariwisata:					

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	4,89	14. Rasio PDRB Penyediaan Makan dan Minum	3,29	4,86
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18,0	100	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan)	536,60	1.341,50			
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			14. Produktivitas UMKM dan Koperasi					
				a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14			
a.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8,0	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,50	9,86	15. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,34	14,55
				c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,8	12,5			
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,0	4,0	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 – 6,99	6,1 – 7,1	16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,54-8,21	4,86-6,03
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70,0	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3			
17	Tingkat penguasaan IPTEK			17. Tingkat penguasaan IPTEK:			17. Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3	a. Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar						
							18. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08 - 5,58	5,2 - 6,4
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau dan Kreatif		
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,80	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30	85,05	19. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	67,87	75,89
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40	67,91			
							20. Indeks Kota Kreatif (poin)	87,86	100
IE6	Transformasi Digital			Transformasi Digital			Percepatan Digitalisasi		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	21. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,4	8	21. Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (skor)	4,80	5,00
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global			Peningkatan Fungsi Hub Antarwilayah		
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9 (2019)	9,0	22. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5,00			
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	23. Pembentukan Modal Tetap	24,7	23,8			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
				Bruto (% PDRB)					
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26,0	40,0	24. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	44,8			
							22. Indeks Konektivitas	3	3,5
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan			Pembentukan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			25. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23. Rasio terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru (%)	0	100
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92	-					
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100			
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	26,23	b. Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51			
	TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA			TRANSFORMASI TATA KELOLA		
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif			Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif			Tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif		
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	24. Indeks Reformasi Hukum	90,7	100			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045		
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045	
25	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5,0	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,30	5,00	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai)	3,01	4,0	
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5,0	26. Indeks Pelayanan Publik	4,60	5,00	25. Indeks Pelayanan Publik (kategori)	A- (Sangat Baik)	A (Pelayanan Prima)	
27	Anti Korupsi			27. Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89				
a.	Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96,98							
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60							
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			
28	Indeks pembangunan hukum	0,60 (2021)	0,84	28. Indeks Kepatuhan Daerah	84,08	94,08				
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78 (2020)	69,16	26. Indeks Rasa Aman (poin)	77,43	88,44	
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia	84,12 – 87,37 (Tinggi)	Tinggi				

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah			Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2	4,6			
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	3,3 – 3,9	1,1 – 3,2	27. Tingkat Inflasi (%)	3,04	2,44
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:					
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a. Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8			
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60						
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20						
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120						
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	-					
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	34. Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03			
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gantar Kawasan			Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah			Peningkatan Kerja Sama dan Investasi		
35	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influencer</i>)	60,4 (2023)	75,0-80,0	35. Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91 (2023)	100	28. Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	85	95
36	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,16 (2023)	45,00	36. Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5			
							29. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	16,12	17,11

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Peningkatan kerukunan umat beragama			Peningkatan Masyarakat yang Inklusif dan Berbudaya		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41	30. Indeks Warisan Budaya (poin)	38,85	40,85
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	31. Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	79,00	84,43
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender			Peningkatan kualitas anak, keluarga, pemuda, dan gender		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	32. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,46	82,22
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 - 0,45	0,23 - 0,21	33. Indeks Ketimpangan Gender (poin)	0,211	0,113
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas			Peningkatan kualitas lingkungan hidup			Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur berkelanjutan		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,70	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup:					
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68	34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	61,28	66,32
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,50	85,00	35. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,69	78,19

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
c.	Timbunan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c. Pengelolaan Sampah	11,54	90,00	36. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,63	80,27
				- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	(2022)				
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	47,77 (2022)	100	37. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	89,01	100
							38. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (poin)	88,37	89,31
							39. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	35,88	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi			Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi					
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.404	2.670	40. Rasio Akses Masyarakat Terhadap Energi (%)	99	100
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	191	165			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Jawa Barat 2025-2045		Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	4,58	1,39	41. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	3,74	0,25
c.	Ketahanan air			c. Ketahanan Air					
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	4,93	63,12	42. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,56	2,06
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	43. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	24,30	100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim			Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	131,62	107,27 - 86,47	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (skor)	92,89	92,21
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	26.699,28	693.081,40
a.	Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	2,66	31,65			
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08			

Sumber: Analisis Bappeda Kota Sukabumi, 2024

BAB VI PENUTUP

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Disusunnya RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD.

Pada pelaksanaannya diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu tahunan, untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan setiap periode 5 (lima) tahunan untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kota Sukabumi.

6.2 PEMBIAYAAN

RPJPD Kota Sukabumi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Sukabumi. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk dari Kota Sukabumi khususnya. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kota Sukabumi.

6.3 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko ditujukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern serta berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Untuk mencapai hal itu perlu adanya analisis risiko untuk mengetahui potensi risiko. Seperti adanya risiko terkait kebijakan, risiko kepatuhan atau risiko legal. Karena itu, diperlukan upaya preventif sehingga ketika risiko terjadi, tidak berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI